



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2021



#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2021 dapat disusun tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai wujud tanggung jawab Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibuat secara periodik berisi informasi mengenai capaian kinerja instansi pemerintah atas rencana dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya secara transparan dan akuntabel, bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan maupun pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban tentang keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2021 tentang pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Pelaporan kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dimaksud, Laporan Kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja yang telah diwujudkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara akurat, relevan, transparan dan akuntabel.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan, maupun bentuk kontribusi lainnya. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi pengelolaan, penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat Jakarta Barat.

Jakarta, 🥞 IJanuari 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,

Yani Wahyu Purwoko, A.P., M.Si NIP 197302241993111001

#### IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi yang berkewajiban untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan melaksanakan sebagian tugas pemerintahan daerah yang dilimpahkan dari Gubernur dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap kedudukan, tugas dan fungsi, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021 untuk menggambarkan serta mendorong transparansi capaian kinerja dan prestasi yang berhasil diraih Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat terhadap berbagai sasaran strategis sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya baik dalam Rencana Strategis, penetapan Indikator Kinerja Utama maupun Perjanjian Kinerja berikut permasalahan dan sejumlah hal yang masih memerlukan perbaikan.

Secara umum Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2021 telah menunjukkan kinerja yang baik. Beberapa penghargaan baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional berhasil diraih oleh perangkat daerah pada Kota Administrasi Jakarta Barat.

Tingkat capaian kinerja sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Barat mencapai 101,93 %. Kenaikan capaian kinerja sebesar 0,85 % apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya lebih disebabkan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Administrasi Jakarta Barat dengan tindak lanjut aduan masyarakat serta kesiapsiagaan penanganan situasi darurat kesehatan masyarakat pandemi Covid-19.

Sekalipun capaian sasaran strategis, kegiatan strategis daerah, sasaran khusus dan sasaran operasional telah masuk dalam kategori memuaskan, namun demikian kerja keras dengan menerapkan nilai-nilai budaya kerja Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kesungguhan, komitmen, inovasi dan kreatifitas serta kapasitas dari seluruh pegawai termasuk koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat masih perlu ditingkatkan demi tercapainya keserasian dan keselarasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat.

# **DAFTAR ISI**

Kata Pengantarii
Ikhtisar Eksekutifiv
Daftar Isivi
Daftar Tabelix
Daftar Gambarxii
Daftar Grafikxiii
Bab 1: Pendahuluan1
Latar Belakang1
Dasar Hukum2
Gambaran Umum Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat3
Struktur Organisasi Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat
Bab 2: Perencanaan Kinerja Tahun 2021 17
Sasaran Strategis

	Pernyataan Visi	18
	Indikator Kinerja Utama	19
	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	22
Bab	3: Akuntabilitas Kinerja	29
	Capaian Indikator Kinerja	31
	Capaian Kegiatan Strategis Daerah	77
	Capaian Sasaran Khusus	32
	Capaian Sasaran Operasional	35
	Analisis Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021	39
	Perbandingan Capaian Kinerja	104
	Realiasasi Anggaran Tahun 2021	۱06
	Prestasi / Penghargaan	115
Bab	4: Penutup	117

#### Lampiran:

- 1. Perjanjian Kinerja
- 2. Realisasi Indikator Kinerja
- 3. Data Realisasi Anggaran
- 4. Lampiran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengadaan Lahan Kelurahan Jembatan Besi Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021
- Lampiran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengadaan Rehab Berat Kantor Camat Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021
- 6. Prestasi dan Penghargaan

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Persebaran Penduduk4
Tabel 2 Data Penduduk Menurut Agama6
Tabel 3 Pegawai Kota Administrasi Jakarta Barat menurut jenjang jabatan dan unit kerja6
Tabel 4 Pegawai Kota Administrasi Jakarta Barat menurut jenjang jabatan dan unit kerja15
Tabel 5 Target dan Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2018-202219
Tabel 6 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan20
Tabel 7 Target Kinerja Sasaran Strategis sesuai Lampiran Perjanjian Kinerja
Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 202124
Tabel 8 Target Kinerja KSD Kota Administrasi Jakarta Barat24
Tabel 9 Target Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional Kota Administrasi Jakarta Barat26
Tabel 10 Program dan Anggaran pada Lampiran Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 202126
Tabel 11 Interpretasi Kategori Nilai Capaian Kinerja31
Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Utama32
Tabel 13 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 sampai dengan tahun 202133
Tabel 14 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program41
Tabel 15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2020 dengan Tahun 202143

Tabel 16 Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Tahun 202145
Tabel 17 Interpretasi Capaian Kinerja Tahun 202147
Tabel 18 Jadwal Pelaksanaan SKM55
Tabel 19 Nilai SKM Pada Kecamatan Kota Adm Jakarta Barat62
Tabel 20 Komponen Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Tabel 21 Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran73
Tabel 22 Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Adm Jakarta Barat75
Tabel 23 KSD Tahun 2021 Kota Adm Jakarta Barat77
Tabel 24 Capaian Indikator KinerjaKSD tahun 202178
Tabel 25 Perbandingan Target dan Realisasi KSD Tahun 2018 sampai dengan tahun 202180
Tabel 26 Indikator Khusus Tahun 2021 Kota Adm Jakarta Barat82
Tabel 27 Perbandingan Indikator Khusus Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 202184
Tabel 28 Indikator Operasional Tahun 2021 Kota Adm Jakarta Barat86
Tabel 29 Perbandingan Indikator Operasional Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 202188
Tabel 30 Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 202190
Tabel 31 Tabel Analisis Sumber Daya Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021
Tabel 31 Tabel Analisis Sumber Daya Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021

Tabel 32 Tabel Perbandingan Nilai IKM Kota Administrasi Jakarta I Tahun 2021	
Tabel 33 Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kota Administrasi Jakarta Barat	107
Tabel 34 Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Perjanjian k Tahun 2019,2020 dengan Tahun 2021	•

# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Peta Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat	. 3
Gambar 2 Bagan Susunan Organisasi	. 13

# **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
Grafik 2 Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021	46
Grafik 3 Progres Realisasi Pelaksanaan Kegiatan s.d Bulan Desembe 2021	



### Latar Belakang

elaksanaan pemerintahan daerah saat ini lebih dituntut pada prinsipprinsip good governance yaitu tranparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Dengan mewujudkan good governance melalui peningkatan kinerja aparat
negara akan menghasilkan kinerja pelayanan publik yang optimal. Good
governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara
dalam menyediakan publik goods and services dimana praktek terbaiknya
disebut good governance.

Agar good governance dapat diwujudkan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Good governance menuntut koordinasi yang baik dan professional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Instansi Pemerintah memiliki tugas dan fungsi utama memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik/stakehoder) Jakarta Barat. Secara periodik pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan hasil atas kinerja yang telah dilaksanakannya selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja diharapkan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 selain mengacu kepada peraturan perundang undangan baik dari tingkat pusat maupun tingkat provinsi, juga mengacu kepada Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2017-2022.

#### Dasar Hukum

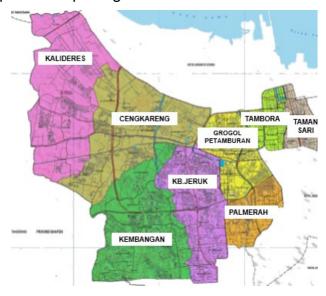
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- 3. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.
- 8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.
- Instruksi Sekretariat Daerah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

#### **Gambaran Umum**

#### Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat

Jakarta Barat terdiri dari 8 Kecamatan, 56 Kelurahan dengan penduduk 2.589.933 jiwa yang menempati areal seluas 12.615,44 ha. Kepadatan penduduk rata-rata di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat adalah 19.993 jiwa/Km2 yang tersebar secara tidak merata dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tambora dengan kepadatan sebesar 44.794 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Kembangan dengan kepadatan penduduk sebesar 13.829 jiwa/km2. Keadaan wilayah pada umumnya beriklim panas dengan suhu udara berkisar 23,0 sampai dengan 35,2 derajat Celcius.

Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata +7 meter diatas permukaan laut. Peta wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang terbagi dalam 8 (delapan) kecamatan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1 Peta Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat

#### Persebaran Penduduk

Persebaran dan kepadatan penduduk di Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai data yang terdapat pada Kota Administrasi Jakarta Barat Dalam Angka 2021 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Persebaran Penduduk

No	Kecamatan	Jumlah	Jumlah Penduduk		
NO	Recalliatali	Kepala Keluarga	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Kembangan	94.586	145.672	143.096	288.768
2	Kebon Jeruk	114.031	171.433	170.505	341.938
3	Palmerah	74.889	109.905	107.405	217.310
4	Grogol Petamburan	82.010	113.672	114.997	228.669
5	Tambora	92.360	130.913	125.147	256.060
6	Tamansari	45.977	64.818	64.828	129.646
7	Cengkareng	183.019	288.720	280.803	569.523
8	Kalideres	141.409	224.332	218.639	442.971
_	Jumlah	828.281	1.249.465	1.225.420	2.474.885

#### Perekonomian

Sebagai ibukota Negara RI dan pusat pemerintahan, perekonomian Jakarta sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian nasional. Selain itu, sebagai kota yang terbuka, perekonomian Kota Jakarta tidak terkecuali Kota Administrasi Jakarta Barat juga dipengaruhi oleh kondisi dan dinamika perekonomian internasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 yang turun -0.84 persen dikarenakan kondisi pandemi Covid

19 dan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi.

Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi perekonomian Jakarta khususnya Jakarta Barat adalah kondisi penyebaran kasus Covid 19, jumlah penduduk, pengembangan infrastruktur kota yang meliputi penataan kawasan dan pemukiman, kebijakan pemerintah daerah, dan iklim ketentraman dan ketertiban yang kondusif yang sangat mempengaruhi iklim berusaha, kelancaran aktivitas ekonomi dan kepariwisataan.

Beberapa kendala besar yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi antara lain penerapan pembatasan sosial dan penerapan mikro *lockdown* sepanjang tahun 2021 selain kenaikan harga kebutuhan pokok, masalah ketahanan pangan, kurangnya permodalan bagi UKM, rendahnya minat investasi dan peningkatan tenaga kerja tanpa diimbangi kesempatan kerja yang memadai serta kecukupan tingkat pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja.

#### Sosial Budaya

Tantangan yang muncul di bidang sosial, adalah pemenuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang mudah mengakses dan diakses masyarakat, ancaman rawan pangan dan penyebaran pandemi Covid 19, serta bertambahnya jumlah penduduk dan pengangguran. Adapun data jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Data Penduduk Menurut Agama

No Kecamatan Pemeluk Agama							
NO	Recalliatali	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Kembangan	236.539	29.884	23.515	628	7.219	52
2	Kebon Jeruk	284.187	33.432	24.864	452	14.676	134
3	Palmerah	206.278	14.069	8.120	566	2.821	28
4	Grogol Petamburan	139.287	37.742	26.667	313	36.767	179
5	Tambora	167.624	31.538	12.726	81	62.969	148
6	Tamansari	75.936	21.011	10.827	87	22.157	31
7	Cengkareng	453.920	56.008	22.860	452	31.480	106
8	Kalideres	352.475	41.515	18.556	235	25.879	117
	Jumlah	1.916.246	265.199	148.135	2.814	203.968	795

# Struktur Organisasi

#### Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat

Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang ada pada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kedudukan Kota Administrasi sebagai perangkat daerah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, yang menyebutkan sebagai berikut :

- Kota Administrasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- Kota Administrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.

Secara umum Kota Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum diwilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat diwilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran
   Kota Administrasi;
- b. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
   Anggaran Kota Administrasi;

- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum diwilayahnya;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat diwilayahnya;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana sarana pelayanan umum;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kecamatan dan kelurahan;
- i. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi;
- j. Pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
- k. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
- Pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota
   Administrasi;
- m. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
- o. Pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik,

- kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi;
- p. Fasilitasi penggordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
- q. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi; dan
- r. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, susunan organisasi Kota Administrasi Jakarta Barat terdiri atas:

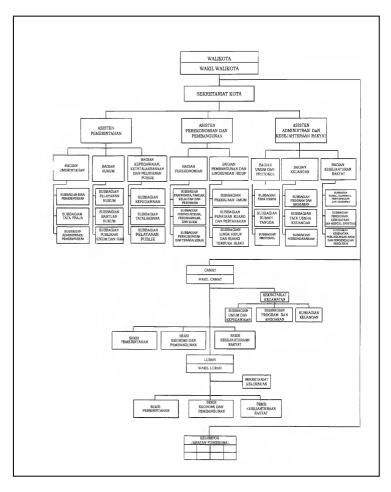
- a. Sekretariat Kota, terdiri atas:
  - 1. Asisten Pemerintahan, terdiri atas :
    - a) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas :
      - 1) Subbagian Bina Pemerintahan;
      - 2) Subbagian Tata Praja; dan
      - 3) Subbagian Administrasi Pemerintahan.
    - b) Bagian Hukum, terdiri atas:
      - 1) Subbagian Pelayanan Hukum;

- 2) Subbagian Bantuan Hukum; dan
- Subbagian Publikasi Hukum dan Hak
   Asasi Manusia.
- c) Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, terdiri atas :
  - 1) Subbagian Kepegawaian;
  - 2) Subbagian Tatalaksana; dan
  - 3) Subbagian Pelayanan Publik.
- 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
  - a) Bagian Perekonomian, terdiri atas :
    - Subbagian Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian;
    - Subbagian Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
    - Subbagian Perhubungan dan Tenaga
       Kerja.
  - b) Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup,terdiri atas :
    - 1) Subbagian Pekerjaan Umum;
    - Subbagian Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan; dan

- Subbagian Lingkungan Hidup dan Ruang
   Terbuka Hijau.
- 3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
  - a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas :
    - 1) Subbagian Tata Usaha;
    - 2) Subbagian Rumah Tangga; dan
    - 3) Subbagian Protokol.
  - b) Bagian Keuangan, terdiri atas :
    - 1) Subbagian Program dan Anggaran;
    - Subbagian Tata Usaha Keuangan;
       dan
    - 3) Subbagian Perbendaharaan.
  - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
    - Subbagian Sosial, Olahraga,
       Perpustakaan dan Kearsipan;
    - SubbagianPendidikan, Kebudayaan
       dan Mental Spiritual; dan
    - Subbagian Kesehatan, Perlindungan
       Anak dan Pengendalian Penduduk.

- b. Kecamatan, terdiri atas:
  - 1. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas :
    - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - b) Subbagian Program dan Anggaran; dan
    - c) Subbagian Keuangan.
  - 2. Seksi Pemerintahan;
  - 3. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
  - 4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
  - 5. Kelurahan, terdiri atas :
    - a) Sekretariat Kelurahan;
    - b) Seksi Pemerintahan;
    - c) Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
    - d) Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi tersebut dalam Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2 Bagan Susunan Organisasi

Adapun UKPD di tingkat Kota Administrasi, yang berkaitan dengan fungsi Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh Kota Administrasi, terdiri atas :

- a. Inspektorat Pembantu Kota Administrasi;
- b. Suku Dinas;
- c. Suku Badan;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi; dan
- e. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi.

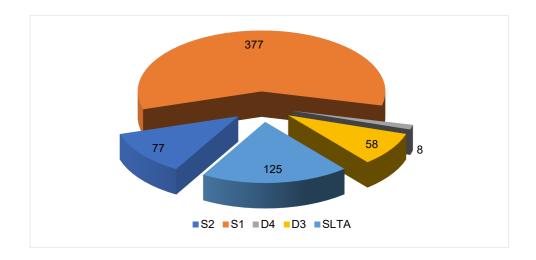
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kota Administrasi Jakarta Barat didukung oleh sebanyak 654 pegawai yang tersebar kedalam tingkat Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan, dengan komposisi berdasarkan jenjang jabatan dan unit kerja sebagai berikut :

Tabel 3
Pegawai Kota Administrasi Jakarta Barat
menurut jenjang jabatan dan unit kerja

No	Kelompok Jabatan	Sekretariat Kota	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah	
1	Pimpinan Tinggi Pratama	2	0	0	2	
2	Administrator	10	23	0	33	
3	Pengawas	21	46	264	331	
4	Pelaksana	83	31	174	288	
	Total	116	100	438	654	

Dalam rangka peningkatan kinerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dilakukan terutama bagi para pegawai yang dipercaya untuk menduduki jabatan struktural. Penyesuaian tingkat pendidikan para pejabat struktural pada jenjang pengawas dan administrator telah dilakukan pengisian jabatan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara, dimana salah satu persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan pengawas adalah memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Diploma 3. Kualifikasi pendidikan pejabat struktural Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai data pada bulan Desember 2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021



Grafik 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi pejabat struktural tidak hanya dari segi pendidikan formal mengingat masih terdapat pejabat struktural yang belum memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4 Kesesuaian Pendidikan, Diklatpim dan Pangkat Pejabat Struktural Kota Administrasi Jakarta Barat

		Jumlah	Kesesuaian			
No	Kelompok Jabatan	Jabatan	Pendidikan	Diklatpim	Pangkat	
1	Pimpinan Tinggi Pratama	2	2	2	2	
2	Administrator	33	33	21	35	
3	Pengawas	331	304	145	314	
	Total	366	339	168	351	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021



# BAB Perencanaan Kinerja Tahun 2021

#### Sasaran Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat senantiasa mengacu pada visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan semua.

Untuk mewujudkan visi Kota Jakarta khususnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2018 telah ditetapkan Rencana Strategis Tahun 2017-2022 yang antara lain berisi tujuan dan sasaran strategis yang akan ditempuh dalam kurun waktu lima tahun ke depan sekaligus sebagai panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi. Renstra tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun berjalan.

Sebagai pemberi arah dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu ditetapkan bersama suatu pandangan ke depan (*vision*) yang akan menjadi sumber motivasi dan inovasi dinamis dalam mewujudkan berbagai bentuk pelayanan publik yang prima. Gambaran ke depan yang dimaksud dirumuskan dalam bentuk visi, misi, tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Barat.

Visi Kota Administrasi Jakarta Barat adalah:

"Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Jasa yang nyaman dan Sejahtera"

Dalam rangka mewujudkan kondisi ideal tersebut, maka dirumuskan sebanyak 4 (empat) Misi sebagai hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai Visi Kota Administrasi Jakarta Barat, yaitu:

- Membangun Tata Pemerintahan yang baik guna terwujudnya sebagai sebagai kota jasa dan wisata budaya dan bersejarah.
- 2. Meningkatkan Kualitas lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.
- Memberdayakan Masyarakat dengan mengembangkan nilai, norma serta pranata sosial.
- 4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari visi dan misi tersebut adalah "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota sehingga tujuan Kota Administrasi Jakarta Barat" Administrasi Jakarta Barat kurun waktu tahun 2018-2022 "Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk Menciptakan Jakarta Sebagai Kota Maju, Lestari dan Berbudaya Warganya Terlibat dalam Mewujudkan Keberadaban yang Kesejahteraan bagi Semua" dapat terwujud.

#### Indikator Kinerja Utama ( IKU )

Ukuran keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Barat akan diukur melalui terwujudnya atau tidaknya target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 152 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2018-2022.

Secara terperinci target kinerja Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Barat yang akan dicapai pada setiap tahun antara tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Target dan Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
	iliulkator Killerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (Termasuk di Kelurahan)	80	83	86	88	88,5

Sasaran strategis Walikota Jakarta Barat merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan berikut dengan indikator kinerja dari program dan kegiatan.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Kinerja penyelenggaraan urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat yang mengemban urusan pemerintahan umum sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut dari tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama kedalam program dan indikator kinerja program terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	
Program peningkatan dan pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4 Index	4 Index	4 Index	4 Index	4 Index	
Program pengelolaan kendaraan operasional Kota Administrasi Jakarta Barat	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4 Index	4 Index	4 Index	4 Index	4 Index	
Program Peningkatan penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	Persentase Penanganan Perkara tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	0	100	100	100	100	
	Persentase Terbinanya	0	20	40	60	80	

Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Lembaga Kemasyarakatan						
	Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	0	100	100	100	100	
	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	0	94	95	96	97	
	Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)	0	100	100	100	100	
	Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	0	100	100	100	100	
	Jumlah Kawasan yang Tertata	0	1	1	1	1	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	0	4 Index	4 Index	4 Index	4 Index	
	Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat	0	100	100	100	100	
	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota	0	100	100	100	100	
	Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak	0	100	100	100	100	
	Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS	0	100	100	100	100	
	Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta	0	85	86	87	88	
Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	0	90	91	92	93	
	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	0	90	91	92	93	
Program peningkatan pengembangan kewilayahan Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan	0	4 Index	4 Index	4 Index	4 Index	

Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	
Administrasi Jakarta Barat	Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten Administrasi						
	Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	0	53	64	72	76	
	Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	0	6	11	11	11	
Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi	85	0	0	0	0	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	80	0	0	0	0	

## Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan penugasan pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan sasaran, indikator dan target kinerja. Perjanjian kinerja merepresentasikan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Melalui penetapan perjanjian kinerja, peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur diharapkan dapat tercapai karena tersedia kejelasan ukuran penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi.

Berdasarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9
Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja
Perangkat Daerah Tahun 2021, para Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwajibkan untuk
melaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja
Perangkat Daerah Tahun 2021. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat
Daerah disusun dengan ketentuan menggunakan sasaran strategis dan
indikator kinerja utama Eselon II atau kondisi yang seharusnya terwujud
pada tahun yang bersangkutan.

Sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur dimaksud, telah dilakukan penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kota Administrasi Jakarta Barat antara Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2021 bertempat di Balai Agung Kompleks Balaikota Jakarta. Dengan demikian, telah terdapat dokumen resmi yang berisi sasaran, indikator dan target kinerja yang menjadi tolok ukur evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Sasaran, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kota Administrasi Jakarta Barat, meliputi :

Tabel 7 Target Kinerja Sasaran Strategis sesuai Lampiran Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	85
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Barat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan	86
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%

Target kinerja pada Perjanjian Kinerja 2021 pada sasaran strategis terdapat Kegiatan Strategis Daerah 2021 dalam pelaksanaan sebagaimana tercantum mewajibkan tercapainya target pada setiap triwulan. Adapun Kegiatan Strategis Daerah 2021 sebagai berikut :

Tabel 8 Target Kinerja KSD Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021

NO	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Keterangan
Keg	atan Strategis Daerah 2021					
1	Meningkatnya kewirausahaan baru	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	e-Monev KSD	100%	Persentase

NO	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Keterangan
	Terwujudnya tata kelola	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (nomor 38)	e-Monev KSD	100%	Persentase
2	pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	2	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	e-Monev KSD	100%	Persentase
3	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	e-Monev KSD	100%	Persentase
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	e-Monev KSD	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	e-Monev KSD	100%	Persentase
5	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan (nomor 66)	e-Monev KSD	100%	Persentase

NO	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Keterangan
6	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	e-Monev KSD	100%	Persentase

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 terdapat pelaksanaan Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional dalam pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah yang mempengaruhi pada capaian Kinerja Perangkat Daerah dan penerimaan penghasilan bila tidak tercapai capaian target yang telah ditetapkan. Sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Target Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional
Kota Administrasi Jakarta Barat
Tahun 2021

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Keterangan				
Sas	asaran Khusus									
1	Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	100%	Persentase				
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	3	WTP				
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	e-Kinerja	100%	Persentase				
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	e-Kinerja	A (81)	Predikat				
Sas	aran Operasional			<u></u>		<u> </u>				

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Keterangan
5	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	100%	Persentase
6	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	100%	Persentase
7	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	93	Nilai
8	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	100%	Persentase

Target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2021 tersebut di atas, diwujudkan melalui penyelenggaraan beberapa program dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 10 Program dan Anggaran pada Lampiran Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	376.126.347.245	APBD Provinsi DKI Jakarta
2	Program Pengelolaan Kecamatan	206.512.245.468	APBD Provinsi DKI Jakarta
3	Program Pengelolaan Kota Administrasi	10.248.645.654	APBD Provinsi DKI Jakarta
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahann dan Pelayanan Publik	272.436.629.218	APBD Provinsi DKI Jakarta
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	54.685.679.146	APBD Provinsi DKI Jakarta
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	2.122.054.514	APBD Provinsi DKI Jakarta



# BAB 3 Akuntabilitas Kinerja

emerintah Kota Administrasi Jakarta Barat di dalam Bab 3 ini akan menyajikan akuntabilitas kinerja yang meliputi capaian kinerja Indikator Kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan uraian capaian masing-masing sasarannya. Laporan ini akan memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

# 1. Metode Pengukuran Kinerja

Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pembandingan kinerja yang (seharusnya) terjadi atau realisasi dengan kinerja yang diharapkan atau target dilakukan dengan memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Karakteristik komponen realisasi tersebut dibedakan menjadi :

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik; dan
- 2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja.

Mencermati Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kota Administrasi Jakarta Barat dimana seluruh target indikator kinerja memiliki karakteristik semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja maka dalam pengukuran capaian kinerja rumus yang digunakan adalah :

Capaian Indikator 
$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

#### 2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan penyimpulan capaian kinerja organisasi secara keseluruhan dan capaian masing-masing sasaran strategis. Capaian kinerja organisasi merupakan nilai rata-rata dari seluruh capaian sasaran strategis. Penyimpulan dilakukan dengan memberi interpretasi atau makna atas nilai rata-rata yang diperoleh. Makna dari nilai tersebut diambil dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, yang dapat digambarkan dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 11 Interpretasi Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	Kode
1	AA	>85 - 100	Memuaskan	
2	Α	> 75 – 85	Sangat Baik	
3	В	> 65 – 75	Baik	
4	CC	> 50 – 65	Cukup	
5	С	> 30 – 50	Kurang	
6	D	0 – 30	Sangat kurang	

# **Capaian Indikator Kinerja**

# 1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Sebagai alat untuk mengukur kinerja yang hasilnya dapat dipergunakan untuk melihat aspek-aspek yang harus diperbaiki dalam rangka peningkatan kinerja berikut akuntabilitasnya, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi tercermin dari terwujud atau tidaknya dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan. Terwujud atau tidaknya dampak yang diharapkan tercermin pencapaian target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 152 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2018-2022,

Hasil pengukuran untuk tahun 2021 yang merupakan tahun keempat periode Rencana Strategis 2017-2022 atas pencapaian target indikator kinerja utama Kota Administrasi Jakarta Barat serta perbandingannya dengan target akhir yang diharapkan, menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	rategis Indikator Kinerja –		Tahun 202′	1		Periode a (2022)
	oasaran otrategis	munator Nillerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Barat	Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan		90,62	102,98%	88,50	102,40%

Berdasarkan tabel tersebut dimana nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 mencapai angka 90,62 telah memberi kontribusi yang sangat baik bagi pencapaian target Rencana Strategis 2017-2022 karena telah berhasil mencapai 102,98% dari target kinerja yang diharapkan dapat terwujud pada akhir periode Rencana Strategis.

Perbandingan realisasi, target dan capaian indikator kinerja utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 13
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2018	80	85,35	106,69%
2	2019	83	84,06	101,28%
3	2020	86	88,01	102,34%
4	2021	88	90,62	102,98%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, realisasi indikator kinerja utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan) yang angkanya diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat, senantiasa berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat telah puas dengan pelayanan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat terutama kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan PPSU dan Ketertiban Umum. Terkait pelaksanaan survei pada Posyandu, PKK, Jumantik, dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) telah disepakati tidak dilaksanakan terkait tidak adanya kegiatan selama Tahun 2021 akibat penyebaran pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan percepatan penanganan pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2021 sehingga tercipta pengendalian penyebaran di Jakarta Barat.

Beberapa faktor penunjang yang memungkinkan tercapainya target indikator kinerja utama, antara lain :

- Dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dilaksanakan aparat kecamatan dan kelurahan.
- 2. Kinerja yang baik dari para Camat dan Lurah beserta seluruh jajarannya dalam memberikan layanan kemasyarakatan.
- 3. Koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit/instansi terkait.
- Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan survei yang memberi kemudahan bagi responden.
- 5. Kegiatan implementasi percepatan penanganan kondisi pandemi Covid-19 Kota Administrasi Jakarta Barat, antara lain :
  - a) Tahap Pencegahan:
    - Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
    - Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
    - Menyediakan alat pengukur suhu di Instansi Pemerintah, Swasta,
       Fasilitas Publik dan Destinasi Wisata;
    - 4) Membuat video tentang tata cara pembuatan disinfektan sederhana;
    - 5) Membuat seruan Bersama 3 pilar Forkopimko (Walikota, Dandim dan Kapolres) terkait pencegahan dan penanganan Covid-19;
    - Rapat koordinasi dalam rangka Gugus Tugas terkait penanganan
       Covid-19 dan Pelaksanaan Desinfeksi massal di Kota Tua;

- Menyediakan sarana cuci tangan di seluruh kantor Pemerintah dan Swasta;
- Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait Perilaku
   Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pencegahan Covid-19;
- 9) Melaksanakan monitoring Pelaksanaan Pembelajaran Di Rumah;
- Melaksanakan pengawasan perilaku siswa didik selama belajar dirumah;
- 11) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghindari keramaian;
- 12) Melaksanakan penjagaan destinasi wisata dan RPTRA dari pengunjung serta melaksanakan SOP di tempat Keramaian;
- 13) Menunda pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB);
- 14) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait penghapusan Ganjil Genap dan koordinasi kepada unsur terkait;
- 15) Melaksanakan sosialisasi pemotongan rute kepada masyarakat terkait Pengurangan armada Transjakarta dan Mass Rapid Transit Jakarta (MRT);
- 16) Melaksanakan pengaturan Jumlah penumpang dan antrian di halte;
- 17) Melaksanakan sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat, kantor pemerintah dan swasta terkait pengaturan jarak antrian;
- 18) Melaksanakan monitoring pasar dan stok logistik;
- Melaksanakan koordinasi kegiatan Operasi Pasar dengan Bulog dan PD Pasar Jaya;

- Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar warga tidak pulang kampung;
- 21) Menyiapkan Prosedur dan monitoring pelaksanaan Work From Home (WFH) bagi karyawan;
- 22) Melakukan pembersihan tempat ibadah dengan desinfektan;
- 23) Menghimbau masjid tidak menggunakan karpet untuk sementara;
- 24) Menghimbau masjid dan tempat ibadah lainnya untuk tidak melaksanakan kegiatan peribadatan sesuai Surat Seruan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020;
- 25) Membangun hotline bagi warga di wilayah masing2 kecamatan;
- 26) Mempersiapkan usulan lokasi alternative karantina di wilayah Jakarta Barat dan melaksanakan kerja bakti massal dan penyemprotan desinfeksi di lokasi usulan karantina serta membuat kajian dampak sosial masyarakat;
- Mengusulkan sarana prasarana medis dan non medis;
- 28) Melaksanakan himbauan langsung kepada masyarakat melalui mobil keliling untuk tetap berada dirumah atau menghindari keramaian.
- 29) Melaksanakan himbauan langsung kepada masyarakat melalui mobil keliling untuk tetap berada dirumah atau menghindari keramaian;
- 30) Melakukan penyemprotan desinfeksi menggunakan alat desinfektan dan Mobil Pemadam Kebakaran ke kampung-kampung disinfektan secara mandiri dan swadaya;

- 31) Melaksanakan sosialisasi dan rapat jarak jauh (Teleconference) di Posko Penanggulangan Covid-19;
- 32) Menghimbau Kantor Urusan Agama (KUA) utk menunda pelaksanaan akad nikah, jika terpaksa akad nikah dilakukan di Kantor KUA saja, yg dihadiri hanya beberapa orang dan mematuhi protokol kesehatan (cuci tangan, jaga jarak, bersalaman tidak bersentuhan, memakai sarung tangan);
- 33) Melaksanakan rapat teknis persiapan pelaksanaan isolasi mandiri RW bersih dan terkait perlindungan dan pencegahan penularan pada masyarakat yang memiliki resiko tinggi kepada Camat dan Lurah;
- 34) Melaksanakan Karantina / Isolasi RW secara mandiri dan monitoring;
- 35) Memberikan perlindungan dan pencegahan penularan pada masyarakat yang memiliki resiko tinggi bekerja sama dg PKK, Dasawisma dan RT;
- 36) Pembentukan Gugus Tugas Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan RW.
- b) Tahap Penanganan/ Pengobatan:
  - Membantu petugas Puskesmas dalam rangka melakukan pemeriksaan di rumah Orang Dalam Pemantauan (ODP);
  - Kegiatan pemutusan rantai penularan (tracing contact) covid-19
     lewat investigasi kasus/ Penyelidikan epidemiologi bekerjasama dengan RS sejakarta Barat, dan fasyankes primer (puskesmas);
  - 3) Penyusunan menu TKTP untuk ODP/PDP;

- Membina jaringan dengan RS Swasta agar data pasien tidak lolos;
- Melakukan pengawasan karantina rumah bagi para pasien terdampak Covid 19;
- 6) Melakukan pemeriksaan rapid test Covid-19;
- 7) Melakukan update kasus setiap hari;
- 8) Membuat Tim Gerak Cepat Kesehatan;
- 9) Pengaktifan Pemantauan Kepatuhan ODP/ PDP yang melakukan karantina Rumah oleh 3 unsur :
- Unsur 1 : Sudinkes dan Puskesmas
- Unsur 2 : Camat/ Lurah
- Unsur 3 : Pihak berwajib
- Melakukan tracing kontak erat yang telah berkontak dengan para pasien positif covid;
- Laporan Harian jumlah ODP/ PDP/ Kasus Positif/ Meninggal kepada Gugus Tugas Covid19 Jakarta Barat;
- 12) Distribusi VTM dan RDT kepada fasyankes Primer dan lanjutan (RSUD dan RS Swasta);
- 13) Komunikasi Cepat (Notifikasi Kasus) kepada lintas Dinas Kesehatan (Provinsi Banten, kota/ Kab Bekasi, kota/ Kab Bogor);
- 14) Membantu petugas Sudin Sosial utk menyalurkan bantuan makan kepada ODP yg sdg diisolasi di rumah;
- 15) Membagikan masker kepada tim kesehatan;
- 16) Memberikan bantuan disinfektan, masker kepada Petugas dan PPSU;

- 17) Menyerahkan bantuan makanan untuk petugas puskesmas;
- 18) Melaksanakan monitoring dan pengawasan ke Masjid terkait pelaksanaan terhadap Jamaah pada Rumah Ibadah;
- 19) Melaksanakan pemeriksaan/Rapid Test pada Rumah Ibadah oleh unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 20) Mengevakuasi Jamaah yang Positif dan 39 Orang Jamaah Masjid Kebon Jeruk yang Kategori ODP ke RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran;
- 21)Melaksanakan Pengamanan di Lokasi Isolasi Masjid yang terdampak Covid 19;
- 22) Penyediakan kebutuhan makan dan minum 3 kali sehari di lokasi isolasi selama pelaksanaan isolasi;
- 23) Melaksanakan pemantauan dan pengecekan kesehatan setiap hari ;
- 24) Memberikan Alat Pelindung Diri (APD) yg diperoleh dari swadaya kepada petugas pemakaman;
- 25) Membantu mengirimkan makanan ke Posko Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Kota Jakarta Barat;
- 26) Menghimpun dan menyalurkan sembako bersama Forkopimko terhadap masyarakat yang membutuhkan;
- 27) Penggalangan dana dan bantuan untuk disalurkan kepada para tim medis dan masyarakat.
- 28) Melakukan patroli malam melibatkan unsur kewilayahan dan 4
  Pilar pada Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi
  Jakarta Barat;

#### c) Tahap Pemulihan:

- Melaksanakan Kerjabakti dan melaksanakan disinfeksi di lingkungan tempat tinggal warga pasien covid;
- Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak Covid-19;
- Melakukan stickerisasi lokasi rumah yang terdampak dan melakukan pendampingan penulusuran lebih lanjut.

Dari data perkembangan terlihat bahwa capaian pada tahun 2021 mengalami kenaikan angka pencapaian Indikator Kinerja Utama dibandingkan dengan yang pernah diraih pada tahun 2020. Hasil evaluasi mencatat beberapa faktor yang menjadi potensi penghambat dalam upaya mengejar angka capaian ini selama tahun 2021, yaitu:

- Refocusing anggaran sehingga terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya dimatikan.
- Terjadinya situasi darurat kesehatan berupa wabah yang disebabkan oleh virus corona atau kondisi pandemi Covid-19.

Upaya mewujudkan sasaran strategis meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Barat pada Tahun 2021 dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program. Target, realisasi dan capaian dari masing-masing indikator kinerja program dengan sumber data pada pengelolahan Akuntabilitas Pemerintah dimaksud dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 14
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4 Index	4 Index	100,00%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4 Index	4 Index	100,00%
3	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Administrasi Jakarta Barat	100	100	100,00%
		2 Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	96	96	100,00%
		3 Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	100	100	100,00%
		Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	86	n/a	-
		5 Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)	100	100	99,90%
		6 Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	100	100	100,00%
		7 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4 Index	4 Index	100,00%
		8 Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	4 Index	4 Index	100,00%
		Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan BOP dan BOS	100	100	100,00%
		10 Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Layak Anak	100	106,25	106,25%
		Persentase Terselesaikannya Permasalahan     Terhadap Pelaksanaan Kota Sehat	100	100	100,00%
		12 Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kota	100	100	100,00%
		13 Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Barat > 80 %	87	94,11	108,17%
4	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	1 Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	92	99,15	107,77%
		2 Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	92	100,00	108,70%
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	'	4 Index	n/a	-
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	4 Index	4 Index	100,00%
	I .	<u> </u>		ı	1

Realisasi indikator kinerja Program Pengelolaan Kota Administrasi Jakarta Barat terutama yang berkaitan dengan indikator Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak mencapai target yang diharapkan terutama disebabkan tidak adanya kegiatan penilaian Kota Peduli HAM oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sehingga nilai realisasi n/a. Selain itu pada indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan berkaitan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten Administrasi oleh adanya kebijakan pada kondisi darurat nasional akibat wabah pandemi Covid-19 sehingga tidak dilakukan realisasi survei sehingga nilai realisasi n/a.

Perbandingan capaian indikator kinerja hanya dilakukan antara tahun 2020 dengan tahun 2021, mengingat terdapat perbedaan program dan indikator kinerja program yang hanya berlaku pada tahun 2021. Secara terperinci perbandingan kinerja yang terkait dengan target dan realisasi dari setiap indikator kinerja program mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Adapun perbandingan capaian dari setiap indikator kinerja program antara tahun 2020 dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

# Tabel 15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2020 dengan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Сар	Peningkatan /	
NO	ilidikator Killerja	2020	2021	Penurunan
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	100,00%	100,00%	0,00%
2	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	100,00%	100,00%	0,00%
3	Persentase Penanganan Perkara tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	100,00%	100,00%	0,00%
4	Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	100,00%	100,00%	0,00%

5	Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	100,00%	100,00%	0,00%
6	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	103,31%	-	0,00%
7	Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)	100,00%	105,25%	5,25%
8	Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	100,00%	100,00%	0,00%
9	Jumlah Kawasan yang Tertata	0,00%	0,00%	0,00%
10	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	100,00%	100,00%	0,00%
11	Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat	100,00%	100,00%	0,00%
12	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota	106,25%	106,25%	0,00%
13	Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak	100,00%	100,00%	0,00%
14	Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS	100,00%	100,00%	0,00%
15	Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta	101,16%	108,17%	7,01%
16	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	104,40%	107,77%	3,37%
17	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	109,89%	108,70%	-1,19%
18	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten Administrasi	100,00%	100,00%	0,00%
	Rata-Rata Capaian	94,64%	95,09%	0,44%

Berdasarkan berbagai tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja program telah terealisasi dengan baik hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata capaian indikator kinerja program yang mencapai 95,09% dengan mengalami kenaikan sebesar 0,44% dibandingkan capaian pada tahun 2020. Kenaikan angka rata-rata capaian indikator kinerja program tersebut didukung dengan realisasi pelaksanaan yang baik dan melakukan antisipasi lebih awal dalam menghadapai permasaslahan yang berpotensi menjadi penghambat, salah satu yang terdampak oleh situasi pandemi Covid-19 dan tidak ada nilai realisasi sehingga indikator kinerja program yang berkaitan dengan kegiatan fisik tidak dapat terselenggara dengan baik.

Dari hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan perlu mendapat perhatian bagi perbaikan kinerja demi terselenggaranya pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih baik, antara lain :

- 1. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah
- 2. Monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan
- 3. Inovasi dan kreatifitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- Melakukan usulan pengecualian pada nilai indikator pada waktu target realisasi sehingga tidak menjadi perhitungan didukung dengan penjelasan terkait.

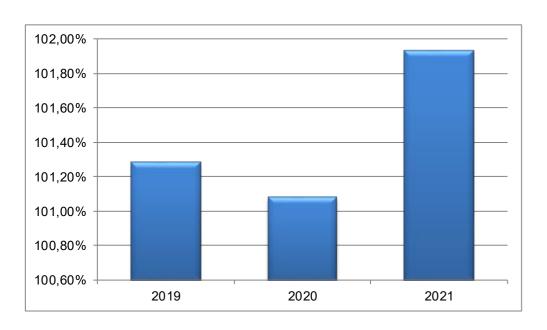
# 2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pada tahun ketiga dari periode Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Barat 2017-2022, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang ditetapkan telah dapat terlaksana dengan cukup baik. Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat pada akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Tahun 2021

1	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Administrasi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	86	Indeks	90,62	105,37%
	Jakarta Barat	Capaian Sasaran Strategis		1		105,37%
pemerintahan da	pemerintahan dan keuangan		91	Persentase	89,63	98,49%
Daerah yang transparan dan akuntabel		Capaian Sasaran Strategis				98,49%
Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di Wilayah Kota Administrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	85	Indeks	n/a	n/a
3	Jakarta Barat untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maiu. lestari dan					n/a
						101,93%

Sedangkan perkembangan capaian Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



**Grafik 2**Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dari tabel hasil pengukuran dan grafik perbandingan capaian tersebut diatas, dapat dilihat bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir realisasi Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat senantiasa berada diatas 100%. Grafik capaian Perjanjian Kinerja menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil evaluasi, kenaikan dikarenakan nilai indeks kepuasan masyarakat yang naik dan mendapatkan hasil sangat baik. Selain itu pada indikator kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam rangka mewujudkan sasaran strategis "Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel" berdampak pada rasionalisasi anggaran 2021 dikarenakan tidak terlaksana kegiatan pada pandemi Covid-19. Pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi belum tersedianya hasil nilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tahun 2021, sehingga nilai realisasi n/a.

Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perhitungan capaian indikator kinerja tersebut diinterpretasikan sebagai berikut:

Tabel 17 Interpretasi Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Capaian	Realisasi		
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Barat	105,37%	AA Memuaskan		
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	98,49%	AA Memuaskan		
3	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	n/a			
	Capaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat	101,93%	AA Memuaskan		

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan nilai capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2021 adalah sebesar 101,93%. Dengan nilai tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2021

untuk mewujudkan target, sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 antara Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, telah terselenggara dengan baik dan menunjukkan kinerja yang termasuk dalam kategori AA atau memuaskan.

Sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Barat" berhasil melampuai target yang ditetapkan sementara sasaran strategis "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel" walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan akan tetapi capaian kinerjanya masih termasuk kategori memuaskan. Sasaran starategis "Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua" dengan indeks Reformasi Birokrasi menunggu hasil penilaian tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Selanjutnya evaluasi dan analisa terhadap capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat dari masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota
Administrasi Jakarta Barat

Pemerintahan akan sangat terbantu kinerjanya apabila tata kelola pemerintahan merupakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dimensi dari good governance yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek akuntansi adalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dalam tatakelola pemerintahan memiliki arti sejauhmana pemerintahan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar. Transparansi memungkinkan semua stakeholder dalam melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi keuangan serta laporan pertanggungjawaban. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Sementara akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja suatu organisasi. Dengan demikian transparan dan akuntabel dapat dimaknai sebagai kemampuan pejabat publik untuk menjawab secara terbuka segala pertanyaan dari masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurusi berbagai urusan dan kepentingan mereka.

Untuk mengukur kinerja aparatur di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat (stakeholder) perihal kebutuhan dan harapan, maka atas dasar Peraturan Gubernur

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Walikota Nomor 26 Tahun 2021 tentang Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Barat. diadakanlah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Salah satu dampak dari pandemi Covid-19, maka Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan terhadap 2 (dua) jenis layanan yakni Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Ketertiban Umum (Tibum). Sedangkan untuk 4 (empat) jenis layanan lainnya yakni Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) tidak dapat dilakukan penilaian diakibatkan kegiatan operasional dari layanan tersebut tidak berjalan sementara waktu selama masa pandemi Covid 19.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah Pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka disebut Indeks Kepuasan Masyarakat, angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Unsur survei kepuasan masyarakat merupakan faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik. Untuk

membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik. Jangka waktu survei antara periode yang satu ke periode berikutnya dapat dilakukan 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan atau sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini instansi-instansi yang memberikan pelayanan dituntut untuk memberikan pelayanan yang memuaskan. Penentuan standar pelayanan adalah salah satu bentuk upaya mencapai kepuasan pelanggan. Cara yang lain adalah dengan mengukur langsung tingkat kepuasan masyarakat atas kualitas layanan yang telah diterima. Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM sangat berguna untuk memahami kebutuhan pengguna layanan dan sebagai tolok ukur kinerja pelayanan publik. Panduan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Keberhasilan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas

selalu menjadi tantangan bagi institusi pelayanan baik publik maupun swasta. Institusi pelayanan dituntut menjadi organisasi yang handal dimana seluruh elemen penggerak di dalam organisasi diberikan kebebasan untuk berdiskusi dan menjalankan standar yang menjadi kesepakatan sehingga konsistensi dalam proses pelayanan tetap terjaga. implementasi dari pelayanan yang dijalankan tersebut haruslah dipantau dan dievaluasi secara sistematik dan teratur.

Survei Kepuasan Masyarakat selain dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan, juga memungkinkan perbaikan pelayanan selain itu menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Melalui analisis kinerja dapat disusun prioritas perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan di Walikota Jakarta Barat pengukuran yang berkesinambungan akan memungkinkan untuk mengetahui kinerja pelayanan masing-masing Kelurahan dan Kecamatan serta untuk memperoleh unsur pelayanan mana yang dianggap penting oleh masyarakat yang menjadi prioritas untuk diperbaiki kualitasnya dan adanya Indeks Kepuasan Masyarakat di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Walikota. Melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat maka untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, Pemerintah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat mengadakan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelurahan Tahun 2021.

Adapun sasaran pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kota Administrasi Jakarta Barat adalah mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan PPSU dan Ketertiban Umum, mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPSU dan Ketertiban Umum, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan PPSU dan Ketertiban Umum, dan mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PPSU dan Ketertiban Umum.

Adapun Laporan Hasil Survei Kepuasan Kota Administrasi Jakarta Barat berisi tentang hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada 56 (lima puluh enam) Kelurahan dan 8 (delapan) Kecamatan terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan yaitu :

- 1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur.
- 3. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- 4. Waktu Penyelesaian
- 5. Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

- 6. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- 7. Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- 8. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- 9. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- 10.Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

#### 11. Sarana dan Prasarana.

Jadwal Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2021 setelah Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dari seluruh Kecamatan diterima oleh Tim Penyusun Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat.

Tabel 18 Jadwal Pelaksanaan SKM Tahun 2021

Kagiatan	Bulan					
Kegiatan	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
Persiapan dan perencanaan SKM 2021	10 Agst	23 Sept				
Sosialisasi/ koordinasi teknis pengisian survey oleh Diskominfotik dan Wilayah Kota Administarsi Jakarta Barat		28 Sept				
Implementasi pelaksanaan SKM melalui Aplikasi di Kelurahan			1-22 Okt			
Pengolahan data/ analisis data oleh Diskominfotik			25 Okt – 14 Nov			
Diskominfotik memberikan hasil pelaksanaan SKM wilayah				15 Nov		
Pengolahan data/ analisis data oleh Bagian KKPP Jakarta Barat				15-26 Nov		
Penyampaian hasil SKM ke tingkat Provinsi				26 Nov – 3 Des		

Pelaporan dilakukan secara berjenjang yang dilakukan mulai dari Kelurahan, dihimpun oleh Kecamatan dan disusun menjadi laporan tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.

#### **METODELOGI**

#### A. Persiapan Penyusunan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Persiapan Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menetapkan Surat Tugas Walikota Nomor 50 /-1.799 tentang Tim Penilai Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Melalui jaksurvei.jakarta.go.id di Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021. Persiapan meliputi sosialisasi, petunjuk teknis, hasil capaian yang diharapkan dan perbandingan nilai pada tahun sebelumnya.

# B. Identitas/Karakter Responden

# 1. Identitas/karakter responden

# Karakteristik Responden Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021

No	Identitas	Jumlah Responden	Presentase
Α	Jenis Kelamin		
1	Laki-laki	9.301	44,77%
2	Perempuan	11.474	55,23%
	Jumlah	20.775	100,00%
В	Pekerjaan		
1	PNS/GURU	284	1,37%
2	TNI	32	0,15%
3	POLRI	21	0,10%
4	Swasta	4.897	23,57%
5	Lainnya	15.577	74,81%
	Jumlah	20.775	100%
С	Pendidikan		
	SMA	13290	63,97%
	SMP	3398	16,36%
	Sarjanan S1	1643	7,91%
	SD	1370	6,59%
	D1/D2/D3/D4	871	4,19%
	Magister S2	117	0,56%
	Tidak Pernah Sekolah	36	0,17%

No	Identitas	Jumlah Responden	Presentase
	Doktor S3	29	0,14%
	Tman kanak-kanak (TK)	21	0,10%
	Jumlah	20.775	100,00%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pengguna layanan sebagian besar :

- 1. Berjenis kelamin perempuan sebanyak 11.474 orang
- 2. Pekerjaan lainnya sebanyak 15.577 orang
- 3. Pendidikan SMA/sederajat sebanyak 13.290 orang

#### C. PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA

#### 1. PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Adapun pelaksanaan survei kepuasan masyarakat ini adalah menggunakan link dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta yang berisi:

#### a. Identitas Responden

Data ini terutama digunakan untuk proses dan pengelompokan responden, yang meliputi : jenis kelamin dan pekerjaan responden.

#### b. Pendapat Responden

Merupakan pendapat masyarakat yang meliputi kepuasan dan keinginan atas 9 unsur pelayanan publik, dimana unsur pelayanan tersebut mengacu pada Peraturan Menterin Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan

#### Pelayanan Publik, yang terdiri dari :

- 1) Persyaratan
- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- 3) Waktu Penyelesaian
- 4) Biaya / Tarif
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- 6) Kompetensi Pelaksana
- 7) Perilaku Pelaksana
- 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- 9) Sarana dan Prasarana

# 1. PENGUMPULAN DATA DILAKSANAKAN MELALUI:

#### a. Pemantauan

Pemantauan adalah proses mengamati dan mencatat secara langsung di lokasi penilaian yang ada kaitannya dengan objek yang dinilai, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

#### b. Pengumpulan Data

Dalam upaya untuk memperoleh informasi tentang kondisi Kota Administrasi Jakarta Barat baik Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi serta informasi lainnya. Data ini digunakan untuk melengkapi data yang telah diperoleh melalui pemantauan dan kuesioner dengan meminta data kepada pihak-pihak yang terkait baik berupa arsip maupun dokumen.

# c. Pengisian Kuesioner

Pengisian Kuesioner merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi daftar pertanyaan atau pernyataan melalui Aplikasi jaksurvei.jakarta.go.id kepada responden untuk dijawab. Kuesioner ini digunakan untuk memperoleh data tentang tingkat kepuasan masyarakat sebagai pemanfaat dari pelayanan 2 (dua) indikator tersebut.

#### D. PENGOLAHAN DATA

#### 1. Penginputan hasil pengisian kuesioner

Data yang telah terkumpul dilakukan pengolahan data untuk mengetahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai IKM didapatkan dari nilai rata-rata tertimbang masing masing 9 unsur pelayanan tersebut.

#### 2. Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat

Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus :

Jumlah Bobot 1

Nilai Rata2 Tertimbang = ---- = --- = 0,11

Jumlah Unsur 9

Selanjutnya untuk mendapatkan nilai IKM dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

Total Nilai Persepsi per Unsur

IKM = -----x Nilai Penimbang

Total Unsur Yang Terisi

Berdasarkan petunjuk dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan memperhitungkan total nilai persepsi untuk setiap unsur pelayanan, Total nilai persepsi diperoleh dengan mengalikan frekuensi responden yang memberikan jawaban untuk setiap skala penilaian. Misalnya untuk dimensi kinerja, nilai 1 diberikan untuk penilaian Sangat Tidak Setuju (STS), nilai 2 Tidak Setuju (TS), nilai 3 (Setuju) dan nilai 4 (Sangat Setuju). Selanjutnya jawaban dikonversikan dengan nilai dasar 25 digunakan untuk mendapatkan rentang penilaian antara 25 – 100 sehingga diperoleh nilai IKM. Nilai IKM kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori A (Sangat Baik), B (Baik), C (Kurang Baik) dan D (Tidak Baik) sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Nilai	Nilai Interval	Nilai Interval	Mutu	Kinerja Unit
Persepsi	IKM	Konversi IKM	Pelayanan	Pelayanan
1	1,00 – 2,59	25.00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65.00 – 76,60	С	Kurang baik
3	3,07 – 3,53	76,61 – 88,30	В	Baik
4	3,54 – 4,00	88,31 – 100,00	Α	Sangat baik

Rumus umum dalam pengambilan ukuran sampel menurut Krejcie dan Morgan ini sebagai berikut :

$$S = { \lambda^2 . N. P. Q}/{ d^2 (N-1) + \lambda^2 . P. Q }$$

dimana :

S = jumlah sampel

 $\lambda 2$  = lamda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0.5

d = 0.05

3. Penentuan Nilai Indeks Kepuasan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Untuk menentukan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Barat dihitung dengan memperhitungkan total nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat seluruh Kecamatan dibagi jumlah Kecamatan, maka IKM Kota Administrasi Jakarta Barat ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

IKM Kota Administrasi Jakarta Barat = total IKM Kecamatan

Jumlah Kecamatan

4. Jenis Pelayanan dan Jumlah Responden

Penyusunan Laporan Hasil Survei Kepuasaan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan kompilasi data dari 2 (dua) jenis pelayanan dengan jumlah responden sebanyak (jumlah responden x jumlah Kecamatan) responden, dengan jenis pelayanan setiap kelurahan sebagai berikut:

- a. Pelayanan PPSU;
- b. Pelayanan Keamanan dan Ketertiban.

Total jumlah responden sebanyak 20.775 (Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima) responden.

# E. HASIL PENGOLAHAN DATA

Kota Administrasi Jakarta Barat telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat pada bulan Oktober Tahun 2021 dengan jenis PPSU dan Ketertiban Umum. Hasil survei di tingkat kelurahan menjadi agregat nilai IKM kecamatan yang selanjutnya menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat. Data tersebut diolah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat didapatkan dari nilai rata-rata IKM pelayanan masing-masing Kecamatan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 19
Nilai SKM Pada Kecamatan Kota Adm Jakarta Barat
Tahun 2021

NO.	KECAMATAN	NILAI IKM					
	PPSU		KETERTIBAN UMUM	TOTAL			
1	Cengkareng	88,61	87,72	88,17			
2	Grogol Prtamburan	89,28	88,86	89,07			
3	Kalideres	93,21	93,54	93,38			
4	Kebon Jeruk	91,39	91,33	91,36			
5	Kembangan	91,74	91,45	91,60			
6	Palmerah	89,79	88,61	89,20			
7	Tamansari	90,89	89,39	90,14			
8	Tambora	91,87	92,22	92,05			

Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan di 8 (delapan) Kecamatan lingkup Kota Administrasi Jakarta Barat dengan hasil sebagai berikut :

### 1. Kecamatan Kalideres

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kalideres yang memiliki nilai terendah ada pada pelayanan PPSU dengan nilai 93,21 dan pada 3 unsur terendah yaitu: Kompetensi petugas mendukung kelancaran penyelesaian semua pekerjaannya, Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas ditindaklanjuti dengan baik, Sarana dan prasarana yang digunakan petugas berfungsi dengan baik.

Sedangkan Survei Kepuasan Masyarakat yang memiliki nilai tertinggi ada pada pelayanan Ketertiban Umum dengan nilai 93,54 dan pada 3 unsur tertinggi yaitu: Persyaratan dalam mendapatkan pelayanan mudah, Perilaku petugas sopan dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat, prosedur mendapatkan pelayanan mudah.

# 2. Kecamatan Kebon Jeruk

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kebon Jeruk yang memiliki nilai terendah ada pada pelayanan Ketertiban Umum dengan nilai 91,33 dan pada 3 unsur terendah yaitu:

Kompetensi petugas, mendukung kelancaran penyelesaian semua pekerjaannya, Sarana dan prasarana yang digunakan petugas berfungsi dengan baik, Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas ditindaklanjuti dengan baik. Sedangkan Survei

Kepuasan Masyarakat yang memiliki nilai tertinggi ada pada pelayanan PPSU dengan nilai 91,39 dan pada 3 unsur tertinggi yaitu:Persyaratan dalam mendapatkan pelayanan mudah, Biaya untuk mendapatkan pelayanan gratis, Perilaku petugas sopan dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

# 3. Kecamatan Kembangan

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kembangan yang memiliki nilai terendah ada pada pelayanan Ketertiban Umum dengan nilai 91,45 dan pada 3 unsur terendah yaitu: Kompetensi petugas, mendukung kelancaran penyelesaian semua pekerjaannya, Sarana dan prasarana yang digunakan petugas berfungsi dengan baik, Waktu Penyelesaian pekerjaan selesai dengan cepat dan hasilnya sesuai yang diharapkan.

Sedangkan Survei Kepuasan Masyarakat yang memiliki nilai tertinggi ada pada pelayanan PPSU dengan nilai 91,74 dan pada 3 unsur tertinggi yaitu: Persyaratan dalam mendapatkan pelayanan mudah, Biaya untuk mendapatkan pelayanan gratis, Perilaku petugas sopan dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### 4. Kecamatan Palmerah

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Palmerah yang memiliki nilai terendah ada pada pelayanan Ketertiban Umum dengan nilai 88,61 dan pada 3 unsur terendah yaitu: Kompetensi petugas, mendukung kelancaran penyelesaian semua pekerjaannya, Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas

ditindaklanjuti dengan baik, Hasil Kerja Petugas umumnya baik dan memuaskan.

Sedangkan Survei Kepuasan Masyarakat yang memiliki nilai tertinggi ada pada pelayanan PPSU dengan nilai 89,79 dan pada 3 unsur tertinggi yaitu: Persyaratan dalam mendapatkan pelayanan mudah, Biaya untuk mendapatkan pelayanan gratis, Perilaku petugas sopan dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

# 5. Kecamatan Tamansari

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Tamansari yang memiliki nilai terendah ada pada pelayanan Ketertiban Umum dengan nilai 89,39 dan pada 3 unsur terendah yaitu: Kompetensi petugas, mendukung kelancaran penyelesaian semua pekerjaannya, Sarana dan prasarana yang digunakan petugas berfungsi dengan baik, Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas ditindaklanjuti dengan baik.

Sedangkan Survei Kepuasan Masyarakat yang memiliki nilai tertinggi ada pada pelayanan PPSU dengan nilai 90,89 dan pada 3 unsur tertinggi yaitu: Persyaratan dalam mendapatkan pelayanan mudah, Biaya untuk mendapatkan pelayanan gratis, Perilaku petugas sopan dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### 6. Kecamatan Tambora

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Tambora yang memiliki nilai terendah ada pada pelayanan PPSU dengan nilai 91,87 dan pada 3 unsur terendah yaitu: Kompetensi petugas mendukung kelancaran penyelesaian semua pekerjaannya,

penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas ditindaklanjuti dengan baik, Sarana dan prasarana yang digunakan petugas berfungsi dengan baik. Sedangkan Survei Kepuasan Masyarakat yang memiliki nilai tertinggi ada pada pelayanan Ketertiban Umum dengan nilai 92,22 dan pada 3 unsur tertinggi yaitu: Persyaratan dalam mendapatkan pelayanan mudah, Waktu Penyelesaian pekerjaan selesai dengan cepat dan hasilnya sesuai yang diharapkan, Hasil Kerja Petugas umumnya baik dan memuaskan.

# 7. Kecamatan Cengkareng

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cengkareng yang memiliki nilai terendah ada pada Ketertiban Umum dengan nilai 87.72 dan pada 3 unsur terendah yaitu: Hasil Kerja Petugas umumnya baik dan memuaskan, Sarana dan prasarana yang digunakan petugas berfungsi dengan baik, Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas ditindaklanjuti dengan baik.

Sedangkan Survei Kepuasan Masyarakat yang memiliki nilai tertinggi ada pada pelayanan PPSU dengan nilai 88.61 dan pada 3 unsur tertinggi yaitu: Persyaratan dalam mendapatkan pelayanan mudah, Biaya untuk mendapatkan pelayanan gratis, Perilaku petugas sopan dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

# 8. Kecamatan Grogol Petamburan

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Grogol Petamburan yang memiliki nilai terendah ada pada Ketertiban Umum dengan nilai 88.86 dan pada 3 unsur terendah yaitu: Kompetensi petugas, sarana dan prasarana yang digunakan petugas berfungsi

dengan baik, penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas ditindaklanjuti dengan baik.

Sedangkan Survei Kepuasan Masyarakat yang memiliki nilai tertinggi ada pada pelayanan PPSU dengan nilai 89.28 dan pada 3 unsur tertinggi yaitu: Persyaratan dalam mendapatkan pelayanan mudah, Biaya untuk mendapatkan pelayanan gratis, Perilaku petugas sopan dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Administrasi Jakarta Barat Kelurahan yang memiliki IKM 3 (tiga) terendah sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah:

	Nilai Jenis Pelayanan			
KELURAHAN	PPSU	TIBUM		
1	2	3		
JOGLO	99,41	99,53		
SUKABUMI SELATAN	98,46	99,51		
TANAH SEREAL	98,56	99,04		

- 1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan memiliki nilai terendah ada pada pelayanan PPSU dengan nilai 80,45 dan pada 3 unsur terendah yaitu: Persyaratan dalam mendapatkan pelayanan mudah, Prosedur mendapatkan pelayanan mudah dan Perilaku petugas sopan dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Cengkareng Timur,
   Kecamatan Cengkareng memiliki nilai terendah ada pada pelayanan

Ketertiban Umum dengan nilai 82,11 dan pada 3 unsur terendah yaitu: Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas ditindaklanjuti dengan baik, Hasil kerja petugas umumnya baik dan memuaskan dan Perilaku petugas sopan dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora memiliki nilai terendah ada pada pelayanan PPSU dengan nilai 82,78 dan pada 3 unsur terendah yaitu: Kompetensi petugas pendukung kelancaran penyelesaian semua pekerjaannya, Persyaratan dalam mendapatkan pelayanan mudah, Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas ditindaklanjuti dengan baik.

Di Kota Administrasi Jakarta Barat Kelurahan yang memiliki IKM 3 (tiga) tertinggi sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah:

KELURAHAN	Nilai Jenis Pelayanan			
RELORATIAN	PPSU	TIBUM		
1	2	3		
JOGLO	99,41	99,53		
SUKABUMI SELATAN	98,46	99,51		
TANAH SEREAL	98,56	99,04		

 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan memiliki nilai tertinggi ada pada Ketertiban Umum dengan nilai 99,53 dan pada 3 unsur tertinggi yaitu: Prosedur mendapatkan pelayanan mudah, Biaya untuk mendapatkan pelayanan gratis dan Sarana

dan Prasarana yang digunakan petugas berfungsi dengan baik.

2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Sukabumi Selatan,

Kecamatan Kebon Jeruk memiliki nilai tertinggi ada pada pelayanan

Ketertiban Umum dengan nilai 99,51 dan pada 3 unsur tertingi yaitu: Biaya

untuk mendapatkan pelayanan gratis, Hasil kerja petugas umumnya baik

dan memuaskan, dan Kompetensi petugas mendukung kelancaran

penyelesaian semua pekerjaannya.

3. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Tanah Sereal,

Kecamatan Tambora memiliki nilai tertinggi ada pada pelayanan

Ketertiban Umum dengan nilai 99,04 dan pada 3 unsur tertinggi yaitu:

Persyaratan dalam mendapatkan pelayanan mudah, Prosedur

mendapatkan pelayanan mudah dan Biaya untuk mendapatkan pelayanan

gratis.

B. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Barat

IKM Kota Administrasi Jakarta Barat : total SKM Kecamatan

Jumlah Kecamatan

= 724,96 : 8 = 90,62

Jadi Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat Pada

tahun 2021 dengan nilai 90,62 (Sangat Baik). Dari pengolahan hasil

Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan di seluruh

Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai

berikut:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021

69

- 1. Secara total responden menilai pelayanan yang diterima di Kota Administrasi Jakarta Barat sudah berada dalam kategori Sangat Baik dengan nilai IKM sebesar 90,62 hal tersebut dikarenakan semua Kecamatan yang tergolong baik karena berada di atas nilai IKM, yaitu: Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Kalideres, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Palmerah, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Tambora
- Masih adanya beberapa Kecamatan dan Kelurahan yang memerlukan perbaikan dan pembinaan terhadap tingkat kepuasan masyarakat pada unsur-unsur pelayanan yang masih rendah.

Untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi

Jakarta Barat perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan kembali penggunaan Aplikasi pada jaksurvei.jakarta.go.id dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat
- b. Meningkatkan kinerja serta kemampuan para pengelola dalam memberikan pelayanan.

Dari hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan pengolahan data/angka Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan pada Tahun 2021, diperoleh angka Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar 90,62. Angka Indeks tersebut melebihi target yang telat ditetapkan di tingkat Kota Administrasi

Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 86 . Secara terperinci angka Indeks Kepuasan Masyarakat pada masing-masing kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong peningkatan nilai indeks kepuasan masyarakat tersebut baik untuk masing-masing bidang pelayanan maupun nilai total kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dan kelurahan, antara lain:

- Dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dilaksanakan aparat kecamatan dan kelurahan.
- 2. Kinerja yang baik dari para Camat dan Lurah beserta seluruh jajarannya dalam memberikan layanan kemasyarakatan.
- 3. Koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit/instansi terkait.
- 4. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan survei yang memberi kemudahan bagi responden.

Disamping adanya faktor pendorong tersebut, dari hasil evaluasi diketahui bahwa terdapat beberapa .faktor yang menjadi penghambat dalam upaya mengejar target Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, yaitu :

- Refocusing anggaran sehingga terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya dimatikan.
- Terjadinya situasi darurat kesehatan berupa wabah yang disebabkan oleh virus corona atau kondisi pandemi Covid-19.

Peningkatan angka realisasi dan capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Barat dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan), menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat telah puas dengan pelayanan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat terutama dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Ketertiban Umum dan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum. Angka Indeks pada tahun 2021 tersebut melebihi target yang telah ditetapkan di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu sebesar 86 dan termasuk dalam kategori B (Baik).



Tercapai tidaknya Sasaran strategis "Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel" ditentukan oleh realisasi dari indikator kinerja "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" yang memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu :

Tabel 20 Komponen Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

No	Komponen	Definisi Operasional	Bobot
1	Penyerapan Anggaran	Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi belanja barang, belanja modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu belanja barang dan belanja modal yang telah ditetapkan di lingkungan perangkat daerah	40%

No	Komponen	Definisi Operasional	Bobot
2	Efisiensi	Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai. apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. hasil lebih sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk kegiatan /belanja lainnya	10%
3	Pencapaian output :	output belanja adalah output yang terdapat pada DPA perangkat daerah. realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran.	50%

Berdasarkan data yang terdapat pada sistem Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui alamat website monev.bapedadki.net dan sistem eSAKIP, dilakukan pengolahan data atas komponen penyerapan anggaran, efisiensi dan pencapaian output, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 21 Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

No	Komponen	Nilai	Bobot	Bobot * Nilai
1	Penyerapan Anggaran	96,14	40%	38,46
2	Efisiensi	16,80	10%	1,68
3	Pencapaian Output	98,98	50%	49,49
	Capaian Kinerja	89,63		

Dari tabel terebut di atas, dapat diketahui bahwa capaian Kota Administrasi Jakarta Barat untuk indikator kinerja "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" yang merupakan ukuran dari sasaran strategis "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel" belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab capaian indikator kinerja hanya mencapai angka 89,63 %, antara lain:

- Keterlambatan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) pada awal tahun anggaran yang menyebabkan keraguan dan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2. Refocusing anggaran sehingga terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya dimatikan.
- Terjadinya situasi darurat kesehatan berupa wabah yang disebabkan oleh virus corona atau kondisi pandemi Covid-19.

Sasaran strategis "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel" walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan akan tetapi capaian kinerjanya masih termasuk kategori memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat telah berupaya secara maksimal dalam mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dengan didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit kerja perangkat daerah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat. Pada pelaksanaan kegiatan yang terkena refocusing anggaran telah dilaksanakan Selain itu dalam refocusing anggaran yang di tunda 2020 telah dilaksanakan pada tahun 2021 menjadi DPA dan RKA 2021 yaitu Pengadaan Kantor Lurah Jembatan Besi Kota Administrasi Jakarta Barat dan Perencanaan Rehab Berat Kantor Camat Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur

Pada target indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi untuk "Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur" dilakukan Pelaksanaan Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2021 dengan penilaian internal didampingi oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi tidak tersedia sampai Desember 2021 penilaian mandiri menjadi penilaian awal pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Kota Administrasi Jakarta Barat.

Evaluasi dilaksanakan terhadap komponen pengungkit ( proses ) atas aspek pemenuhan dan aspek reformasi dengan nilai 33,45 atau 92,15%. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen pengungkit yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22
Hasil Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Adm Jakarta Barat

Aspek Pemenuhan						
1	Manajemen Perubahan	2.00				
2	Deregulasi Kebijakan	1.00				
3	Penataan dan Penguatan	2.00				
	Organisasi					
4	Penataan dan Tatalaksana	0,83				
5	Penataan Sistem Manajemen	1,26				

	SDM	
6	Penguatan Akuntabilitas	2.50
7	Penguatan Pengawasan	2.14
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan	2.50
	Publik	
Aspe	ek Perubahan	
1	Manajemen Perubahan	3.00
2	Deregulasi Kebijakan	2.00
3	Penataan dan Penguatan	1.50
	Organisasi	
4	Penataan dan Tatalaksana	2.63
5	Penataan Sistem Manajemen	1.80
	SDM	
6	Penguatan Akuntabilitas	2.83
7	Penguatan Pengawasan	1.71
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan	3.75
	Publik	
	Total	33.45

Hal ini menunjukkan bahwa jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat telah berupaya secara maksimal dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi dan mencapai nilai pada target kinerja yang ditetapkan dengan didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit kerja perangkat daerah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat.

# **Capaian Kegiatan Strategis Daerah**

# 1. Capaian Kegiatan Strategis Daerah 2021

Sebagai dukungan pelaksanaan perjanjian kinerja pada Kegiatan Strategis Daerah tahun 2021 terdapat pelaksanaan sebanyak 8 KSD yang tercapai dengan realisasi pelaksanaan Rencana Aksi pada setiap triwulan pada B03, B06, B09, dan B12. Terdapat 45 Rencana Aksi yang terbagi sebanyak 13 Renaksi pada target B03, 12 Renaksi pada target B06, 8 Renaksi pada target B09, dan 12 Renaksi pada target B012. Keberhasilan pencapaian realisasi Kegiatan Strategis Daerah tercermin dari terwujud atau tidaknya dampak yang diharapkan dari pelaksanaan renaksi dengan kolaborasi dan penataan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat. Adapun KSD Tahun 2021 pada Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai berikut:

Tabel 23 KSD Tahun 2021 Kota Adm Jakarta Barat

No		Kegiatan Strategis Daerah	Kuadran	Bobot
1	20	Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu	Harvest	0,66
2	38	Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Harvest	0,66
3	39	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA	Drive	1
4	45	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat	Drive	1
5	61	Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan	Navigate	0,33
6	63	Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Navigate	0,33
7	66	Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan	Navigate	0,33
8	73	Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian	Harvest	0,66

Hasil pelaksanan Kegiatan Strategis Daerah untuk tahun 2021 yang merupakan pencapaian seluruh bagian ukpd, dan unsur teknis atas pencapaian Kota Administrasi Jakarta Barat serta perbandingannya dengan target akhir yang diharapkan, menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 24 Capaian Indikator Kinerja KSD tahun 2021

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
Kegia 2021	tan Strategis Daerah					
1	Meningkatnya kewirausahaan baru	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	100%	100%	Terealisasi pada B03,B06,B09 dan B12
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (nomor 38)	100%	100%	WTP Permprov DKI Jakarta
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	100%	Terealisasi pada B12

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
3	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	100%	100%	Terealisasi pada B03,B06,B09 dan B12
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	100%	100%	Terealisasi pada B12
	informasi	2	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100%	100%	Terealisasi pada B12
5	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan (nomor 66)	100%	100%	Terealisasi pada B03,B06,B09 dan B12
6	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	100%	100%	Terealisasi pada B03,B06,B09 dan B12

Kegiatan Strategis Daerah selain dimaksudkan untuk mendukung tingkat pembangunan dan rencana kinerja Tahun 2021, dilakukan berkelanjutan dan mencapai target sasaran yang perlu ditambah menjadi bagian dari Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2022.

Adapun pelaksanaan lanjutan pada tahun 2022 pada KSD 45 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat pada Rencana Aksi Verifikasi warga Eks Kampung Kunir yang akan menghuni rumah susun yang perlu dilengkapi pada target B03 Tahun 2022. Dari hasil pelaksanaan KSD Tahun 2021 melalui sistem monitoring ksd.jakarta.go.id dengan pengolahan data maka capaian pelaksanaan Renaksi seluruh KSD terealisasi dengan baik dengan capaian Persentase 100 % pada Tahun 2021. Persentase tersebut memenuhi target yang telah ditetapkan untuk Kota Administrasi Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta dengan Capaian 100 %. Secara terperinci dibandingkan dengan capaian setiap tahun maka pecapaian dapat digambarkan pada tabel :

Tabel 25 Perbandingan Target dan Realisasi KSD Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021

No	Tahun	Renaksi	Target	Realisasi	Capaian
1	2018	3	100	100,00	100,00%
2	2019	15	100	100,00	100,00%
3	2020	37	100	100,00	100,00%
4	2021	45	100	100,00	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, realisasi KSD setiap tahunnya terealisasi dengan baik dan memuaskan serta senantiasa berhasil

mencapai target yang telah ditetapkan melalui penambahan jumlah renaksi setiap tahunnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kota Administrasi Jakarta Barat mendukung dan mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah dengan menyelesaikan target Kegiatan Strategis Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa hal yang menjadi dukungan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021 dengan capaian angka 100 %, antara lain :

- Kolaboratif unsur Kota Administrasi Jakarta Barat dalam melakukan dukungan, penyelesaian hambatan, dan memberikan rencana jangka pendek, menengah dan panjang dalam mewujudkan capaian KSD Tahun 2021
- Apresiasi dan dukungan stakeholder dalam pelaksanaan penataan wilayah dan pemukiman dengan melakukan diskusi bersama dan mengutamakan kepentingan bersama sehingga pelaksanaan berjalan tepat waktu.
- Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala pada setiap triwulan capaian KSD 2021 yang terdampat hambatan dan memberikan laporan capaian secara berkala pada pimpinan.

Hal ini menunjukkan bahwa jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat telah berupaya secara maksimal dalam mewujudkan target kinerja Kegiatan Strategis Daerah yang ditetapkan dengan didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit kerja perangkat daerah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat.

# **Capaian Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional**

# 1. Capaian Sasaran Khusus

Sebagai dukungan pelaksanaan perjanjian kinerja tahun 2021 pada Kepala Perangkat Daerah terdapat Indikator Khusus tersusun pada Sasaran Khusus tahun 2021. Sasaran Khusus pada rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2021 mempunyai bobot 20 % pada hasil realisasi dan capaian. Terdapat empat Sasaran Khusus pada Perjanjian Kinerja 2021 yang terdiri dari pemanfaatan e-order, pencapaian opini laporan keuangan daerah WTP, implementasi strategi komunikasi publik program-program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan Predikat Baik. Indikator khusus menjadi bagian dari Pengolahan e-kinerja dalam capaian penerimaan TPP pada Kepala Perangkat Daerah. Adapun capaian dan realisasi indikator Khusus Tahun 2021 pada Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai berikut:

Tabel 26
Indikator Khusus Tahun 2021 Kota Adm Jakarta Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Keterangan
Sas	aran Khusus					
1	Meningkatknya Pemanfaatan E- Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	e- Kinerja	100%	100%	Pemanfaatan e- Order untuk kode rekening Jamuan Tamu pada kegiatan keprotokolan sebesar Rp78.000.000,00 telah terealisasi 100% pada Triwulan III.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Keterangan
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	e- Kinerja	3	3	Target kinerja tahunan yaitu nilai 3 dan predikat WTP telah tercapai 100% pada Triwulan II
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program- program unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program- program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	e- Kinerja	100%	100%	Paparan Strategi Komunikasi, Editorial Plan dan Potensi Krisis diinput kedalam sistem Strakom dan materi program unggulan yang dipublikasikan melalui berbagai media .
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	e- Kinerja	A (81)	AA (93,85)	Paparan Strategi Komunikasi, Editorial Plan dan Potensi Krisis diinput kedalam sistem Strakom dan materi program unggulan yang dipublikasikan melalui berbagai media .

Capaian Sasaran Khusus Tahun 2021 telah tercapai sesuai dengan kesepakatan perjanjian kinerja. Pada pelaksanaan indikator pemanfaatan e-order dan pemanfaatan Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercapai 100 %. Capaian ini merupakan dukungan dan Kerjasama perangkat daerah pada Kota Administrasi Jakarta Barat termasuk Kelurahan dan Kecamatan dalam memastikan terinformasi program unggulan tersampaikan dengan baik. Pada capaian laporan opini keuangan daerah telah terealisasi predikat WTP telah tercapai 100% pada

Triwulan II pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada indikator Predikat SAKIP Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2021 sebagai indikator keberhasilan Nilai/Predikat diperoleh dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan capaian nilai SAKIP 93,85. Pelaksanaan hasil dituangkan dalam Keputusan Gubernur menjadikan nilai Predikat Kota Administrasi Jakarta Barat dengan predikat AA.

Adapun pelaksanaan indikator khusus mencapai Persentase pemenuhan target yang telah ditetapkan untuk Kota Administrasi Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta dengan Capaian rata-rata 100 % . Secara terperinci dibandingkan dengan capaian setiap tahun maka pecapaian dapat digambarkan pada tabel :

Tabel 27
Perbandingan Indikator Khusus
Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021

No	Indikator Khusus	2020	2021	Capaian	Keterangan
1	e-order	0%	100%	100,00%	Naik 100%
2	WTP	100%	100%	100,00%	Tercapai
3	Strategi Komunikasi	100%	100%	100,00%	Tercapai
4	Predikat SAKIP	83	93,85	113,07%	Naik 13,07 %

Hasil pelaksanan Indikator Khusus pada pelaksanaan e-order baru dilaksanakan pada tahun 2021 dengan kenaikan 100 % dan Kenaikan Predikat Sakip naik 13,07 % dibandingkan capaian tahun 2020. Capaian sasaran khusus ini merupakan kinerja bersama dalam memberikan capaian realisasi yang baik pada masyarakat dan komitmen melakukan perubahan dalam mendukung Program Gubernur Provinsi DKI

Jakarta. Berdasarkan hasil evaluasi tabel dan capaian, terdapat beberapa hal yang menjadi dukungan pada sasaran khusus Tahun 2021 dengan capaian angka rata-rata 103,6 %, antara lain :

- Pelaksanaan pemanfaatan e-order dapat mudah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab mendukung transparasi, kemudahan, dan pemanfaatan UMKM.
- 2. Implementasi Strategi Komunikasi Publik yang disusun secara berkala tersosialisasi dengan baik dengan pemenuhan kebutuhan tepat sasaran pada setiap Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Dukungan penggunaan e-SAKIP dalam perencanaan, penggunaan dan implementasi pada seluruh pejabat pengampu dengan melakukan realisasi tepat waktu dan mencapai target dengan baik.
- 4. Akuntabilitas pelaksanaan opini keuangan dapat secara akuntabel mempertahankan WTP selama 5 Tahun berturut-turut.

Hal ini menunjukkan bahwa jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat telah berupaya secara maksimal dalam mewujudkan target kinerja Sasaran Khusus yang ditetapkan dengan didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit kerja perangkat daerah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat.

# 2. Capaian Sasaran Operasional

Sebagai dukungan pelaksanaan perjanjian kinerja tahun 2021 pada Kepala Perangkat Daerah terdapat penyusunan Sasaran Operasional yang mendukung pelaksanaan sasaran sebanyak empat indikator operasional pada tahun 2021. Sasaran Operasional pada masing-masing indikator Capaian Kinerja Tahun 2021 mempunyai bobot 15 % pada masing-masing hasil realisasi dan capaian. Terdapat empat Sasaran Operasional pada Perjanjian Kinerja 2021 yang terdiri dari arahan Gubernur , Tindak lanjut aduan masyarakat, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK. Indikator operasional menjadi bagian dari Pengolahan e-kinerja dalam capaian penerimaan TPP pada Kepala Perangkat Daerah. Adapun capaian dan realisasi indikator Khusus Tahun 2021 pada Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai berikut:

Tabel 28
Indikator Operasional Tahun 2021 Kota Adm Jakarta Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Keterangan		
Sas	Sasaran Operasional							
1	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	100%	100%	Terdapat 8 Tindak Lanjut Arahan Gubernur pada tahun 2021 terselesaikan 100 %		
2	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	100%	99,96%	Penyelesaian Aduan Masyarakat melalui aplikasi CRM dan doorstop dengan total aduan 4.733 Aduan dan terselesaikan		
3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	93	94,88	Pelaksanaan Survei menggunakan Aplikasi JAKI dengan sasaran dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota Administrasi Jakarta Barat		

4	Terselesaikannya	Persentase progress	e-Kinerja	100%	100%	Pelaksanaan	
	tindak lanjut	penyelesaian tindak				tindak lanjut	
	rekomendasi	lanjut rekomendasi				tercapai setiap	
	temuan hasil	temuan hasil				triwulan dan	
	pemeriksaan	pemeriksaan eksternal				terealisasi 100 % .	
	eksternal (BPK)	(BPK)					

Capaian Sasaran Operasional Tahun 2021 telah tercapai sesuai dengan kesepakatan perjanjian kinerja. Pada pelaksanaan indikator Tindak Lanjut arahan Gubernur telah terselesaikan sebanyak 8 Arahan yang diselesaikan dan dilaporkan kembali kepada Provinsi DKI Jakarta dengan capaian terselesaikan 100 %. Pada Indikator penanganan aduan masyarakat sepanjang Tahun 2021 terdapat 4.733 Aduan Masyarakat yang ditindak lanjuti dengan capaian terselesaikan 99,96 % dengan sisa pencapaian dikarenakan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022. Pada pelaksanan Survei Kepuasan Masyarakat melalui JakSurvei terlaksana setiap triwulan pada tahun 2021, pelaksanaan dengan target sasaran pada level Kelurahan, Kecamatan, dan Kota Administrasi Jakarta Barat didukung 4 Pilar stakeholder dengan hasil realisasi 94,88 dengan melebihi target sebesar 1,94 %. Pada indikator Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan temuan hasil eksternal (BPK) terselesaikan dengan pelaksanaan capaian 100 persen pada setiap triwulan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat.

Adapun pelaksanaan indikator operasional mencapai Persentase pemenuhan target yang telah ditetapkan untuk Kota Administrasi Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta dengan Capaian rata-rata100,4 %.

Secara terperinci dibandingkan dengan capaian setiap tahun maka pecapaian dapat digambarkan pada tabel :

Tabel 29
Perbandingan Indikator Operasional
Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021

No	Indikator Khusus	2020	2021	Capaian	Keterangan
1	Arahan Gubernur	100%	100%	100,00%	Terealisasi
2	TL Aduan Masyarakat	99.70%	99.96%	100,01%	Naik 0,01 %
3	SKM	93	94.8	101.94%	Naik 1,94 %
4	TLHP BPK	100	100	100,00%	Terselesaikan

Hasil pelaksanan Indikator Operasional pada pelaksanaan Tindak Lanjut Aduan Masyarakat meningkat 0,01 % dalam penanganan sepanjang Tahun 2021. Hal ini menjadi kinerja keras Aparatur Sipil Negara Kota Administrasi Jakarta Barat dalam bergerak cepat, tepat dan akurat dalam penyelesaian permasalahan yang dilaporkan. Pada Survei Kepuasan Masyarakat melalui JakSurvei meningkat nilai persepsi masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat dalam kepuasan layanan ASN pada level Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Barat, kenaikan ini didukung pelaksanan Budaya Kerja Organisasi dalam memberikan pelayanan terbaik dengan kenaikan 1,94%. Berdasarkan hasil evaluasi tabel dan capaian, terdapat beberapa hal yang menjadi dukungan pada sasaran khusus Tahun 2021 dengan capaian angka ratarata 100,4 %, antara lain:

Penanganan Tindak Lanjut Aduan Masyarakat dilaksanakan sesuai
 SOP dan tepat sasaran dengan kualitas baik dan memuaskan

- Penerapan Budaya Organisasi bagi Pegawai pada Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu Berintegritas, Kolaboratif, Akuntabel, Integritas dan Berkeadilan.
- Dukungan stakeholder 4 Pilar dalam mendukung rencana kinerja serta realisasi di lapangan mencapai hasil kolaboratif yang memuaskan.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam memastikan penyelesaian hambatan dan kendala pelaksanaan capaian sasaran operasional yang dilaksanakan setiap bulan pada Tahun 2021.

Kota Administrasi Jakarta Barat telah berupaya secara maksimal dalam mewujudkan target kinerja Sasaran Operasioal yang ditetapkan dengan didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit kerja perangkat daerah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat.

# **Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021**

# 1. Capaian Kinerja Tahun 2021

Kinerja (performance) adalah tingkat prestasi atau hasil nyata seseorang yang dihitung secara periodik baik kualitas maupun kuantitas berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai hasil kewenangan dan tanggung jawab sebuah pekerjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi.

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang atau jasa, kualitas barang atau jasa, perbandingan hasil kerja dengan target dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Presentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik dukungan pelaksanaan perjanjian kinerja tahun 2021.

Tabel 30 Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021

No	Caravar Chuahasia	To dilect on King original	Realisasi			2021		Canaian
INO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Utara	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	ı	84,06	88,01	86	90,62	105,37%
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	,	-	89,60 %	91%	89,63%	98,49%
3	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua.	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	85	n/a	-

# 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kota Administrasi Jakarta Barat terealisasi dengan baik dan mencapai kenaikan bila dibandingkan dengan Tahun 2020. Keberhasilan ini merupakan kebanggaan jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan komitemen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Keberhasilan adalah tingkat prestasi atau hasil nyata yang dihitung secara periodik baik kualitas maupun kuantitas berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai hasil kewenangan dan tanggung jawab sebuah pekerjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Keberhasilan tercapainya target yang telah ditetapkan dengan pengukuran

yang sesuai serta kriteria yang telah tercapai. Penjelasan bagaimana pelaksanaan analisa :

# A. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)

#### • KEBERHASILAN

Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam penerapan indikator layanan kegiatan kemasyaratan seharusnya membutuhkan manajemen, atau tatanan tindakan sebagai langkah-langkah strategik agar target yang diharapkan tersebut tercapai. Dengan demikian manajemen yang baik akan pendukung dalam pelaksanan capaian target sasaran menjadi sangat penting. Manajemen yang baik menjadi dukungan dalam capaian yang baik dengan didukung keberhasilan. Dalam kerangka mencapai suatu keberhasilan, disyaratkan adanya keterampilan manajemen yang sesuai dengan target, sasaran dan tujuan yang diharapkan. Tidak terpenuhinya tiga hal tersebut, dapat dipastikan bakal mengakibatkan kegagalan. Keberhasilan yang terjadi dalam kinerja disebabkan:

- Adanya sistem, mekanisme dan prosedur serta persyaratan yang dibangun dalam memberikan pelayanan sangatlah mudah dan tidak butuh waktu lama dalam menindaklanjuti setiap warga yang membutuhkan pelayanan.
- Adanya pemahaman masyarakat dalam prosedur permohonan setiap pelayanan di Kantor Kelurahan, sehingga masyarakat mudah dalam mendapatkan pelayanan.
- 3) Cepat tanggapnya pemerintah dalam merespon pengaduan.

- 4) Pemerintah pada saat melakukan penertiban menjalankan sesuai SOP dengan cara humanis.
- 5) Adanya kolaborasi pada semua stakeholder seluruh unsur aparatur Kelurahan.
- 6) Perilaku petugas sopan dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan apa yang dikerjakan para petugas dirasa sudah mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
- 7) Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas ditindaklanjuti dengan baik.
- 8) Semua kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur yang ada, tepat sasaran, cepat dan akurat.
- 9) Semua pelayanan gratis, bila ada pelayanan berbayar sesuai dengan tabel retribusi.
- 10)Telah dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkala.

# • Faktor Kegagalan dikarenakan HAMBATAN

Pada pelaksanaan pencapaian indikator kinerja dalam pelaksanaan capaian terdapat ketidaksesuaian suatu target atau tujuan yang ingin dicapai dengan kendala hambatan yang terjadi pada pelaksanaan pada tahun 2021. Pelaksanaan monitor dan evaluasi memonitor pelaksanaan, memperbaiki capaian kinerja sesuai pencapaian target, meminimalisir resiko, dan memberikan penyelesaian bila terdapat hambatan yang terjadi. Hambatan yang terjadi dan dapat teratasi dalam capaian kinerja tahun 2021 disebabkan:

- 1) Pengendalian penyebaran Virus Covid 19 pada masa pandemi dengan pelaksanaan pembatasan sosial dan penegakan aturan dalam mendukung pelaksanaan 5 M.
- Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdampak terkena Covid 19 melakukan isolasi dan pemulihan sehingga keterbatasan Sumber Daya Manusia.
- 3) Tidak adanya kegiatan dikarenakan refocusing anggaran dan mengalihkan kegiatan menjadi daring.
- 4) Penanganan lokasi yang sangat luas dan pengendalian yang berpotensi tidak terukur.
- 5) Laporan menggunakan CRM yang susah diidentifikasi , pelaporan tidak jelas, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- 6) Pelayanan warga yang masih minta pengurusan melalui biro jasa lainnya dan tidak mengurus sendiri sehingga terjadi penyampaian informasi yang tidak akurat. Seperti pelayanan Gratis menjadi berbayar.
- Kondisi cuaca ekstrem yang mengakibatkan sarana dan prasarana terdampak untuk diperbaiki.
- Langkah-langkah TINDAK LANJUT
- Dalam pelaksanaan pencapaian Indikator strategis perlu dilakukan tindak lanjut dalam penanganan potensi hambatan, Adapun Langkah-langkah tindak lanjut yaitu :
- Sumber Daya Manusia yang mumpuni, yang cukup, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki petugas sangat berdampak pada cepatnya waktu penyelesaian pelayanan.

- Seluruh pelayanan yang diberikan untuk masyarakat bersifat gratis (tidak dipungut bayaran) hal ini sesuai ketentuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tidak ada pungutan liar.
- Untuk pelayanan pada prinsipnya sudah melakukan prinsip pelayanan prima yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional serta partisipatif.
- 4) Kejelasan tupoksi petugas pelayanan, mengetahui tupoksinya masing-masing dan sudah adanya penetapan.
- 5) Adanya pembinaan kepada petugas secara rutin dan diadakan evaluasi kinerja petugas.
- 6) Dalam melaksanakan pekerjaan petugas pelayanan secara rutin harus dilaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja yang akan menentukan apakah yang bersangkutan akan diperpanjang kontraknya ataupun dihentikan.
- 7) Diterapkan kedisiplinan dan tanggung jawab.
- 8) Sarana prasarana yang digunakan petugas berfungsi dengan baik.
- 9) Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas segera ditindaklanjuti dengan baik.
- 10)Pada saat kejadian ketertiban umum, dalam tindak lanjutnya harus dilakukan sesuai dengan SOP, dalam penanganannya harus dilakukan beberapa tahap.
- 11) Pengawasan juga harus dilakukan oleh masyarakat yang meminta pelayanan oleh petugas pelayanan dimana masyarakat

dapat melaporkan apabila ada sikap dan perilaku petugas pelayanan yang kurang baik.

#### B. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

#### • KEBERHASILAN

Pada indikator strategis terdapat penjelasan persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada meta indikator. Keberhasilan yang dimaksud :

- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu :
  - a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%.
    Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran ≥ 80%. Apabila serapan anggaran di bawah < 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.</li>
  - b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana

- selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.
- c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD

Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:

- Serapan Anggaran ≥80% dan output 100%
   Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%)
- Serapan Anggaran <80% dan ouput <100%</li>
   Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (pencapaian output X 50%)
- Serapan Anggaran ≥80%, namun output <100%</li>
   Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%).

#### •KEGAGALAN/HAMBATAN

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2021, pencapaian indikator kualitas pelaksanaan penggunaan Anggaran yang mencapai 89,63% dari target sebesar 91%. Hal ini tidak mencapai capaian target yang ditargetkan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab capaian indikator kinerja antara lain :

1. Refocusing anggaran sehingga terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya dimatikan.

- 2. Terjadinya situasi darurat kesehatan berupa wabah yang disebabkan oleh virus corona atau kondisi pandemi Covid-19.
- Pelaksanaan realisasi fisik dan anggaran yang perlu dilakukan monitor dan evaluasi secara berkala.

#### Langkah-langkah TINDAK LANJUT

Dalam pelaksanaan pencapaian Indikator strategis agar mencapai target yang diharapkan maka perlu dilakukan tindak lanjut dalam penanganan potensi hambatan,

Adapun Langkah-langkah tindak lanjut yaitu:

- Pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi secara berkala agar capaian setiap bulan dan akhir tahun dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan
- 2) Perlu ada dukungan perencanaan dan pengawasan besama secara berkala dan berkelanjutan dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

#### C. Indeks Reformasi Birokrasi

#### • KEBERHASILAN

Pada indikator strategis terdapat penjelasan capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada meta indikator. Keberhasilan yang dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi , yaitu:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penguatan pengawasan
- c. Penguatan akuntabilitas
- d. Penataan Organisasi
- e. Penataan tatalaksana
- f. Penataan manajemen SDM
- g. Deregulasi Kebijakan
- h. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementrian PAN-RB dan diberikan kepada Perangkat Daerah. Dalam penilaian awal maka menggunakan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan dengan pengisian Lembar Kerja Evaluasi pada Tahun 2021. Pada Tahun 2021 penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kota Administrasi Jakarta Barat mendapatkan nilai 33,45 dengan kategori Baik.

#### KEGAGALAN/HAMBATAN

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2021, pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi untuk Kota Administrasi Jakarta Barat belum tersedia sehingga capaian realisasi n/a. Hal ini menjadi evaluasi bersama dalam mendapatkan nilai Indeks Reformasi Biro Organisasi dengan kategori 85 dapat tercapai.

#### Langkah-langkah TINDAK LANJUT

Dalam pelaksanaan pencapaian Indikator strategis agar mencapai target yang diharapkan maka perlu dilakukan tindak lanjut dalam penanganan potensi hambatan,

Adapun Langkah-langkah tindak lanjut yaitu :

- Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan dengan baik dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
- 2) Perlu ada dukungan kolaboratif pada unsur teknis perencanaan, operasional dan pengawasan besama secara berkala dan berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi sekala berkelanjutan pada Kota Administrasi Jakarta Barat.

#### 3. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas penggunaan sumber daya adalah menerangkan bahwa dalam penyelenggaraan perjanjian kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dibutuhkan Analisa Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Capaian Realisasi Anggaran, dukungan stakeholder dan mewujudkan capaian yang diharapkan. Formasi pegawai yang ada di Kota Administrasi Jakarta Barat, pelayanan kepada masyarakat dan realisasi Anggaran dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 31
Tabel Analisis Sumber Daya
Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021

No		Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
1	FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)				
	Jenis Jabatan :	ABK	Eksisting	Selisih +/-	
	Eselon II	3	2	(1)	
	Eselon III	35	33	(2)	
	Eselon IV	352	331	(21)	
	Jabatan Pelaksana :				
	Teknis Ahli	167	156	(11)	
	Teknis Terampil	12	11	(1)	
	Administrasi Ahli	168	20	(148)	
	Administrasi Terampil	412	92	(320)	
	Operasional Ahli	-	-	-	
	Operasional Terampil	-	-	-	
	Pelayanan Ahli	9	1	(8)	
	Pelayanan Terampil	64	6	(58)	
	Mutasi Pegawai	-	-	-	
	Pegawai Tugas Belajar	-	-	-	
	CPNS	-	-	-	
	Jabatan Fungsional	4	2	(2)	
	Ahli Utama	-	-	-	
	Ahli Madya	-	-	-	
	Ahli Muda	-	-	-	
	Ahli Pertama	-	-	-	
	Penyelia	-	-	-	
	Mahir	-	-	-	
	Terampil	-	-	-	
	Pemula				
	Total Pegawai	1226	654	(571)	Permintaan penambahan pegawai ke BKD Prov. DKI

No		Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
2	REALISASI ANGGARAN	Pencapaian persentase indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021	Persentase Anggaran yang terealisasi 89,63 %	Tidak terserapkan secara maksimal, dikarenakan kondisi terdampak pandemi corona covid-19, realiasi serapan dan fisik, refocusing anggaran, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.	Penyusunan Anggaran dilaksanakan dengan tahapan yang baik, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta komitmen dalam pelaksanaan akutanbilitas yang lebih baik.
3	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Pencapaian nilai indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 oleh Kemenpan RI sebesar 85	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokras i(PMPRB) dengan nilai BAIK	Pelaksanaan 8 Area perubahan pada Reformasi Birokrasi Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dukungan unsur perencanaan, operasional, dan pengawasan Bersama.	Pelaksanaan Penilaian mandiri harus tepat waktu, dilakukan pendampingan secara berkala oleh unsur pengawasa internal dalam hal ini adalah Inspektorat dan Biro ORB.

No		Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
4	PELAYANAN KEPADA MASYRAKAT	Bentuk pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.	1. Pelaksanaan pelayanan publik (public service) di Wilayah Kota Admnistrasi Jakarta Barat, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penyelenggaraan pelayanan publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat khususnya di 2 (dua) jenis layanan yang telah disurvei setelah di konversikan ke dalam kolom Nilai Interval Konversi/NIK sebesar 90,62. Mutu Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Pelayanan berpredikat "Sangat Baik".  2. Hasil analisis pengolahan SKM memberikan informasi dari 2 (dua) jenis layanan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.:  3. Kelurahan yang telah mencapai Nilai Interval Konversi predikat "Sangat Baik' adalah adalah Kelurahan Joglo, Sukabumi Selatan, dan Tanah Sereal	-Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan pada masa PSBB dan PPKM pada umumnya tidak mengalami perubahan dibandingkan pada situasi sebelum pandemi covid 19, namun pelayanan tetap lebih mengutamakan sistem daring yaitu melalui situs jakevo.jakarta.go.id dsn pelayanan.jakarta.go.id. Pelayanan langsung dengan tatap muka tetap memperhatikan protokol kesehatan serta jaga jarak.  - Penanganan pengaduan, saran dan masukan selama masa PSBB dan PPKM baik lewat kotak pengaduan maupun secara online melalui JAKI tetap berjalan sebagaimana pada saat kondisi normal sebelum pandemi covid 19.  - Keterlibatan ASN dalam melaksanakan dukungan pada program Tracing dan Vaksinasi pada wilayah RW tempat bekerja sehingga menambah target kinerja selama masa pandemi Covid 19 pada Tahun 2021	Pelayanan tetap sesuai SOP Pelayanan Publik, Membiasakan penggunaan layanan secara daring dan memastikan warga masyarakat mudah mengakses dan memberikan layanan dukung pada masa waktu kerja.  Penanganan aduan masyarakat melalui kanal pengaduan segera di Tindak lanjuti dengan cepat, tepat dan akurat. Penanganan Bersama teknis terkait menjadi bentuk kolaboratif dan sasaran pada capaian kinerja pada Tahun 2021.  Memaksimalkan peran ASN dalam menjaga ketertlibatan langsung dan mengajak warga partisipasi aktif dalam pelaksanan Vaksinasi Covid 19.

#### PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja adalah tingkat prestasi atau hasil nyata seseorang yang dihitung secara periodik baik kualitas maupun kuantitas berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah dicapai pada pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses penilaian capaian pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan kepuasan pada masyarakat Jakarta Barat dengan perbandingan hasil kerja dengan target dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Adapun perbandingan dapat diukur dengan capaian kinerja wilayah Kota Administrasi lainnya ataupun sejenis.

Perbandingan capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan sejalan dengan capaian perbandingan lainnya. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja utama yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (Termasuk di Layanan Kelurahan)" pada Kota Administrasi Jakarta Barat.

Pengukuran perbandingan kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk capaian nilai akhir yang dicapai rata-rata pada tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dengan pengumpulan data berjenjang dari Kelurahan, Kecamatan, dan Kota. Perbandingan pencapaian dibandingkan dengan pencapaian pada tingkat sejenis.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 pada Lampiran halaman 1221 maka disampaikan pemantauan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di unit pelayanan publik dengan indikator 1 indeks.

		1	l.					1	1	
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik I							7,0			
Pendampingan pembentukan Mall Pelayanan Publik	Jumlah Kabupaten/Kota di Kota Besar/Sedang/KEK	3 Kab/Kota	5,0	Daerah		07				
Pemantauan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di unit penyelenggara pelayanan publik	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional	-	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1,2	Pusat		07
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam Pelayanan Publik	Jumlah Intansi di Wilayah I yang Melaksanakan Porum Konsultasi Publik	-	50 IP	50 IP	50 IP	50 IP	0,8	Pusat		04
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik II							7,0			
Pendampingan pembentukan Mall Pelayanan Publik	Jumlah Kabupaten/Kota di Kota Besar/Sedang/KEK	3 Kab/Kota	5,0	Daerah		07				
Pemantauan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di unit penyelenggara pelayanan publik	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional	-	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1,2	Pusat		07
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam Pelayanan Publik	Jumlah Intansi di Wilayah I yang Melaksanakan Porum Konsultasi Publik	-	50 IP	50 IP	50 IP	50 IP	0,8	Pusat		04

Perbandingan capaian IKU pada Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2021 dilakukan perbandingan pada Kota dan Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta pada indikator kepuasan masyarakat, selain itu dibandingkan pada Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Maluku Tengah. Pelaksanaan hasil nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai perbandingan merupakan hasil pada Tahun 2021

Tabel 32
Tabel Perbandingan Nilai IKM
Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021

No	No Sasaran Strategis Indikator Kinerja			Kota/K	abupaten Adr	n Adminsitrasi DKI Jakarta		Kota/Kabupaten		
			Jakarta Barat	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepualauan Seribu	Yogyakarta	Maluku Tengah
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Utara	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	90,67	91,36	93,89	91,24	92,99	87,72	84,15	88,39

### Realisasi Anggaran Tahun 2021

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis, Kota Administrasi Jakarta Barat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 990.885.734.841,00 atau sebesar Rp 922.131.601.245,00 pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran. Dari total alokasi anggaran dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, sebesar Rp355.362.146.612,00 dikelola Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Barat sedangkan selebihnya sebesar Rp566.769.454.633,00 terbagi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 8 (delapan) kecamatan dan 56 (lima puluh enam) kelurahan.

Target, realisasi dan capaian dari masing-masing program pendukung sasaran strategis Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2021 sesuai data Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Provinsi DKI Jakarta melalui alamat website monev.bapedadki.net, tercatat sebagai berikut :

Tabel 33 Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Sacren Strategia / Dragram	Angga	aran	Realisasi	Capaian	
NO	Sasaran Strategis / Program	DPA	DPPA	Realisasi	(5/4)	
1	2	3	4	5	6	
Α	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Barat					
1	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	207.482.230.625	206.512.245.468	203.556.660.428	98,57%	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	11.237.315.871	10.248.645.654	6.644.757.464	64,84%	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	273.444.107.435	272.436.629.218	265.930.872.308	97,61%	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.303.432.751	54.685.679.146	49.031.358.801	89,66%	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.141.148.984	2.122.054.514	1.853.154.818	87,33%	
	Sub Total	569.608.235.666	546.005.254.000	527.016.803.819	96,52%	
В	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	421.277.499.175	376.126.347.245	359.526.727.447	95,59%	
	Sub Total	421.277.499.175	376.126.347.245	359.526.727.447	95,59%	
	Total	990.885.734.841	922.131.601.245	886.543.531.266	96,14%	

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat dalam upaya mencapai tujuan dengan mewujudkan sasaran-sasaran strategis melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang direncanakan dalam rencana strategis telah terselenggara dengan baik. Dengan capaian sebesar 96,14%, seluruh indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan telah dapat menghasilkan outcome dan output yang diharapkan.

Adapun perbandingan target dan realisasi anggaran antara tahun 2021 dengan tahun 2019 dan 2020 dimana program dan indikator

kinerja program identik dengan yang dipergunakan pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 34
Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja
Tahun 2019,2020 dengan Tahun 2021

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	642.010.113.193	606.254.115.844	94,43%
2020	598.595.368.040	582.297.289.114	97,28%
2021	922.131.601.245	886.543.531.266	96,14%

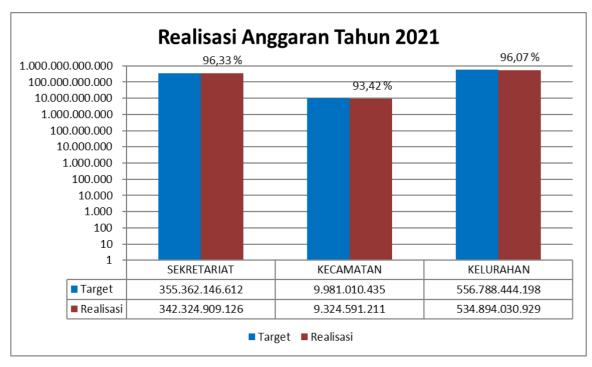
Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa capaian kinerja anggaran Kota Administrasi Jakarta Barat mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021 terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian agar pencapaian sasaran strategis maupun pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya dapat terselenggara dengan lebih baik, antara lain :

- Kebijakan refocusing anggaran yang mengakibatkan sebagian besar kegiatan tidak memperoleh dukungan anggaran menuntut inovasi dan kreatifitas dari seluruh aparat dan jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat dalam mewujudkan kinerja, outcome dan output yang diharapkan.
- 2. Adanya kendala keterlambatan penerbitan Surat Penyediaan Dana yang menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa koordinasi dan kerja sama yang baik antara Kota Administrasi Jakarta Barat dengan unit kerja perangkat daerah

perlu dipertahankan sehingga dapat tercipta pola hubungan kerja yang baik antara jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat dengan seluruh perangkat daerah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat.

- 3. Situasi dan kondisi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 mengharuskan seluruh pegawai untuk sigap dan tanggap dalam mengantisipasi berbagai perubahan keadaan serta senantiasa meningkatkan kapabilitas terutama untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 4. Pelaksanaan realisasi anggaran dan fisik yang perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pada setiap bulannya dalam mencapai target realisasi yang baik dan sesuai capaian

Grafik 3
Progres Realisasi Pelaksanaan
Kegiatan s.d Bulan Desember Tahun
2021



No	PD/UKPD	Target (APBD Perubahan Tahun 2021	Realisasi Aggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2021 (%)	Realisasi Fisik Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
1	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	355.362.146.612	342.324.909.126	96,33%	98,23%
2	KECAMATAN KEBON JERUK - JAKBAR	1.313.116.229	1.254.227.679	95,52%	100,00%
3	KELURAHAN SUKABUMI SELATAN – JAKBAR	7.569.246.272	7.299.603.938	96,44%	99,98%
4	KELURAHAN SUKABUMI UTARA – JAKBAR	8.454.433.970	8.208.064.976	97,09%	100,00%
5	KELURAHAN KELAPA DUA – JAKBAR	6.746.800.371	6.454.302.890	95,66%	100,00%
6	KELURAHAN DURI KEPA - JAKBAR	11.686.918.254	11.159.456.898	95,49%	78,52%
7	KELURAHAN KEDOYA UTARA - JAKBAR	11.877.483.642	11.377.939.379	95,79%	100,00%
8	KELURAHAN KEBON JERUK - JAKBAR	12.227.171.705	11.939.740.000	97,65%	100,00%
9	KELURAHAN KEDOYA SELATAN - JAKBAR	9.052.855.556	8.668.261.324	95,75%	100,00%
10	KECAMATAN KEMBANGAN – JAKBAR	1.321.026.305	1.226.206.019	92,82%	100,00%
11	KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN - JAKBAR	12.211.964.529	11.767.884.743	96,36%	100,00%
12	KELURAHAN MERUYA UTARA - JAKBAR	12.622.449.958	12.076.780.679	95,68%	100,00%
13	KELURAHAN MERUYA SELATAN - JAKBAR	10.864.240.673	10.125.225.095	93,20%	100,00%

No	PD/UKPD	Target (APBD	Realisasi Aggaran	Realisasi	Realisasi Fisik
		Perubahan	Tahun 2021	Anggaran Tahun	Tahun 2021
		Tahun 2021	(Rp)	2021 (%)	
14	KELURAHAN	10.104.416.152		96,65%	100,00%
	SRENGSENG -		9.766.367.538		
	JAKBAR				
15	KELURAHAN JOGLO -	10.728.897.595		95,76%	100,00%
	JAKBAR		10.273.589.234		
16	KELURAHAN	10.978.369.875		96,76%	100,00%
	KEMBANGAN UTARA		10.622.425.193		
	– JAKBAR				
17	KECAMATAN	943.527.064		96,18%	100,00%
	CENGKARENG -		907.451.351		
	JAKBAR				
18	KELURAHAN	15.359.587.471		97,14%	100,00%
	CENGKARENG BARAT		14.920.489.037		
	- JAKBAR				
19	KELURAHAN	16.451.456.582		96,93%	100,00%
	CENGKARENG TIMUR		15.946.952.866		
	- JAKBAR				
20	KELURAHAN KAPUK -	15.224.771.200		98,04%	100,00%
	JAKBAR		14.926.608.736		
21	KELURAHAN DURI	13.568.615.029		96,29%	100,00%
	KOSAMBI - JAKBAR		13.064.564.038		
22	KELURAHAN RAWA	14.055.021.378		96,92%	100,00%
	BUAYA - JAKBAR		13.621.820.307		
23	KELURAHAN	10.229.168.754		97,00%	100,00%
	KEDAUNG KALI		9.922.774.179		
	ANGKE - JAKBAR				
24	KECAMATAN	1.303.017.818		92,27%	100,00%
	KALIDERES - JAKBAR		1.202.294.070		
25	KELURAHAN KAMAL -	10.506.647.508		96,87%	100,00%
	JAKBAR		10.177.805.873		
26	KELURAHAN TEGAL	13.980.505.693		95,60%	100,00%
	ALUR - JAKBAR		13.365.954.315		

No	PD/UKPD	Target (APBD	Realisasi Aggaran	Realisasi	Realisasi Fisik
		Perubahan	Tahun 2021	Anggaran Tahun	Tahun 2021
		Tahun 2021	(Rp)	2021 (%)	
27	KELURAHAN	14.679.171.658		97,63%	100,00%
	PEGADUNGAN -		14.331.174.665		
	JAKBAR				
28	KELURAHAN	14.786.377.454		96,65%	100,00%
	KALIDERES - JAKBAR		14.291.612.742		
29	KELURAHAN	10.538.049.101		96,33%	100,00%
	SEMANAN - JAKBAR		10.151.267.739		
30	KECAMATAN	1.459.301.054		93,67%	100,00%
	GROGOL		1.366.870.426		
	PETAMBURAN -				
	JAKBAR				
31	KELURAHAN	12.816.137.488		97,55%	100,00%
	TOMANG - JAKBAR		12.502.042.517		
32	KELURAHAN	8.759.625.735		95,32%	100,00%
	TANJUNG DUREN		8.349.344.995		
	UTARA - JAKBAR				
33	KELURAHAN GROGOL	9.069.631.153		96,24%	100,00%
	– JAKBAR		8.728.513.815		
34	KELURAHAN	10.176.098.529		95,67%	100,00%
	JELAMBAR - JAKBAR		9.735.174.579		
35	KELURAHAN	10.145.204.729		95,54%	100,00%
	JELAMBAR BARU -		9.692.646.134		
	JAKBAR				
36	KELURAHAN WIJAYA	10.619.438.215		96,22%	100,00%
	KUSUMA - JAKBAR		10.217.777.894		
37	KELURAHAN	8.252.293.939		95,93%	100,00%
	TANJUNG DUREN		7.916.541.122		
	SELATAN - JAKBAR				
38	KECAMATAN	1.263.994.741		91,99%	100,00%
	PALMERAH - JAKBAR		1.162.774.460		
39	KELURAHAN	13.275.100.926		95,83%	94,94%
	PALMERAH - JAKBAR		12.722.119.003		
	1				

No	PD/UKPD	Target (APBD	Realisasi Aggaran	Realisasi	Realisasi Fisik
		Perubahan	Tahun 2021	Anggaran Tahun	Tahun 2021
		<b>Tahun 2021</b>	(Rp)	2021 (%)	
40	KELURAHAN	10.223.717.575		95,62%	94,72%
	KEMANGGISAN -		9.776.161.838		
	JAKBAR				
41	KELURAHAN SLIPI -	7.252.881.942		95,58%	100,00%
	JAKBAR		6.932.205.975		
42	KELURAHAN KOTA	8.338.444.299		93,33%	93,95%
	BAMBU UTARA –		7.782.472.818		
	JAKBAR				
43	KELURAHAN JATI	10.227.876.822		94,58%	95,53%
	PULO - JAKBAR		9.673.725.209		
44	KELURAHAN KOTA	7.619.781.693		97,08%	98,32%
	BAMBU SELATAN -		7.397.116.939		
	JAKBAR				
45	KECAMATAN	1.218.003.719		91,71%	100,00%
	TAMBORA - JAKBAR		1.117.076.976		
46	KELURAHAN KALI	7.225.623.810		95,09%	100,00%
	ANYAR - JAKBAR		6.871.059.045		
47	KELURAHAN DURI	6.959.795.867		96,09%	100,00%
	UTARA - JAKBAR		6.687.429.156		
48	KELURAHAN TANAH	9.959.357.693		95,05%	86,04%
	SEREAL - JAKBAR		9.466.863.797		
49	KELURAHAN	7.411.030.142		97,43%	100,00%
	KRENDANG - JAKBAR		7.220.787.254		
50	KELURAHAN	8.430.340.722		94,36%	100,00%
	JEMBATAN BESI -		7.954.577.404	,	
	JAKBAR				
51	KELURAHAN ANGKE	10.502.605.178		93,85%	100,00%
	- JAKBAR		9.856.755.277		
52	KELURAHAN	7.509.766.675		95,61%	100,00%
	JEMBATAN LIMA -		7.180.024.720		
	JAKBAR				
	ı	<u> </u>	1	<u> </u>	<u>ı</u>

No	PD/UKPD	Target (APBD	Realisasi Aggaran	Realisasi	Realisasi Fisik
		Perubahan	Tahun 2021	Anggaran Tahun	<b>Tahun 2021</b>
		<b>Tahun 2021</b>	(Rp)	2021 (%)	
53	KELURAHAN DURI	6.290.230.920		96,53%	98,36%
	SELATAN - JAKBAR		6.071.978.150		
54	KELURAHAN	6.156.218.624		95,16%	100,00%
	TAMBORA - JAKBAR		5.858.016.514		
55	KELURAHAN	9.255.962.222		96,64%	99,91%
	PEKOJAN - JAKBAR		8.945.127.806		
56	KELURAHAN ROA	5.966.329.435		92,76%	99,50%
	MALAKA - JAKBAR		5.534.283.365		
57	KECAMATAN TAMAN	1.159.023.505		93,85%	100,00%
	SARI – JAKBAR		1.087.690.230		
58	KELURAHAN KRUKUT	7.649.311.407		97,31%	100,00%
	– JAKBAR		7.443.383.416		
59	KELURAHAN MAPHAR	8.073.608.853		95,29%	100,00%
	– JAKBAR		7.693.000.220		
60	KELURAHAN TAMAN	7.352.319.108		97,45%	100,00%
	SARI – JAKBAR		7.164.807.852		
61	KELURAHAN TANGKI	6.918.670.463		94,68%	100,00%
	– JAKBAR		6.550.793.892		
62	KELURAHAN	5.977.266.911		92,40%	100,00%
	MANGGA BESAR -		5.523.033.551		
	JAKBAR				
63	KELURAHAN	8.044.243.697		95,25%	100,00%
	KEAGUNGAN –		7.661.750.664		
	JAKBAR				
64	KELURAHAN GLODOK	6.386.517.180		96,38%	100,00%
	– JAKBAR		6.155.354.755		
65	KELURAHAN	9.438.391.866		97,14%	100,00%
	PINANGSIA - JAKBAR		9.168.494.869		

Sejalan dengan situasi darurat kesehatan masyarakat akibat wabah yang disebabkan oleh virus corona atau pandemi Covid-19, berbagai penilaian atau perlombaan yang diselenggarakan pada tahun-tahun sebelumnya baik tingkat nasional maupun pada tingkat provinsi sebagian besar tidak dilaksanakan pada tahun 2021. Pelaksanaan Inovasi, keberlanjutan dan kolaborasi dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kota Administra Jakarta Barat dengan mengajak stakeholder.

Bersama jajaran menjadi kolaborator pada setiap aksi kolaborasi pada setiap pelaksanaan kegiatan di seluruh wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Terdapat prestasi atau penghargaan yang berhasil diraih Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai salah satu bukti nyata dari upaya yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada level Nasional, Pemerintah Provinsi, dan antar wilayah Kota Administrasi.

Penghargaan yang berhasil diraih Kota Administrasi Jakarta Barat selama tahun 2020 antara lain Kota Layak Anak Peringkat Madya Tahun 2021 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Sertifikat Eradikasi Frambusia Tahun 2021 dari Kementrian Kesehatan, Juara Umum Lomba MTQ tingkat Provinsi DKI Jakarta, dan Masuk dalam Inovasi 99 Sinovik Kemenpan RI melalui Pelayanan Publik Si-Imut (Skrining Integrasi Masyarakat Taman Sari). Secara terperinci, berbagai penghargaan tahun 2021 yang berhasil diraih Kota Administrasi Jakarta Barat dapat dilihat pada bagian lampiran.





Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 nilai capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2021 adalah sebesar 101,93% dengan kenaikan dibandingkan tahun 2020. Dukungan pada Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021 sebanyak 8 KSD Tahun 2021 dengan pelaksanaan Rencana Aksi sebanyak 45 Renaksi dengan capaian 100 %. Terdapat Sasaran Khusus dan Operasional pada pelaksanaan perjanjian Kinerja Tahun 2021. Adapun pada Tahun 2021 capaian ratarata Sasaran Khusus sebesar 103,6 % dan Sasaran Operasional sebesar 100,4 %.

Kenaikan ini merupakan hasil kerja bersama jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didukung penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan Kota Administrasi Jakarta Barat Terbaik. Komitmen pelayanan kepada masyarakat dan penanganan Pandemi Covid 19 berdampak pada penyesuaian realisasi penggunaan anggaran dan pembatasan mobilitas melalui kegiatan PPKM dan kegiatan lainnya. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

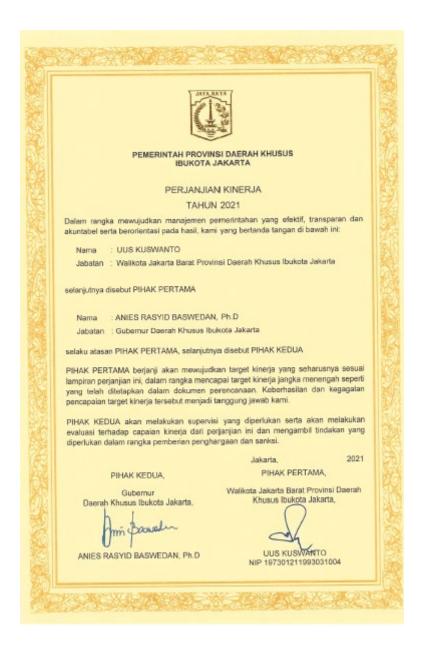
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol serta partisipasi kolaborasi dari masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat .



# LAMPIRAN



#### PERJANJIAN KINERJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2021



#### PERJANJIAN KINERJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2021

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Name NIP : Uus Kuswanto : 197301211993031004 : Walikota : Kota Administrasi Jakarta Barat

batan : Walikota

nii Keria : Kota Administrasi Jakarta Barat

NO	Sasaran	NO	Indikator Kineria	Sumber Data	Pengukuran Kineria		T	lwulan		Tahunan	Keterangen
						- 1	1	III	IV		
	ın Strategis				,						
1	Mewijuhan tah kelola pemerintahan dan keuangan Jaerah yang akuntabal dan ransperan serta peringkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Indeks Raformasi Birokrasi	eSAKIP	Bardisankan Peraturan Menial Pendipragunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tehun C00 terdang Pedolam Evaluasi Peleksanaan Reformati Birokrasi maka Indeks Reformasi Birokrasi adalah nibil alahir dali sarangilalan kegiram evaluasi atau penlalan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yalki:  a. Manajiemen Perubahan b. Penguatan Pengawasan c. Penguatan pengawasan c. Penguatan daurabilitas d. Perataan Organisasi e. Penataan latalaksana l. Perataan Organisasi e. Penataan satraksana h. Penatan ketishishan h. Paningkatan kusitas pelayanan publik. Adapun penlikian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan deh Kementrian PAN-RB.	N/A	N/A	NA	85	85	Indeks
1	Meningkatiya kusitas penyelenggarzan pelayanan publik kota Administrasi Jakarta Barat	1	Indeks kepuasan mesyarakatan terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	e-SAKIP	Indels Kepussan Masjarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Momor 14 Tahun 2017 adalah nadil pengukuran dari kegiatan Survei Kepussan Masyarakat berupa angka. Angka dibidapkan dengan skala 1 (sata) sampai dengan 4 (empad). Sumet Kepusaan Masyarakat berupa angka. Angka dibidapkan dengan skala 1 (sata) sampai dengan 4 (empad). Sumet Kepusaan masyarakat sehadap kusilisa leginan yang diberikan oleh pempelanggara pelapanan pubik. Bido QRB sesual bid melakannakan kegiatan perumusan dan penyasunan bahan lebijahan, pembinaan, pemantakan dan evaluasi, biribingan dan konsulisat dan penyajan dokumen IKM Pavirisa DRI Jalanta untuk dilaporkan ke Kementarian PAN dan RB. IKM = Total Nilai SKPD yang melaksanakan SKM Usmlah SKPD yang melaksanakan SKM	N/A	N/A	N/A	86	86	Ni lai

Lampiran: Perjanjian Kinerja Tahun 2021

### LKIP Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021

3	Mening ketinya ku alifasi pe laksan aan ar ggaran	1	Persentase kualitas pelaksansan anggaran	eSMOP	Persentisoe Krailitiss Polisissenaan Anggaran dilakukan dengan mengutur 3 Komponen yahu:  a. Persyerapan Anggaran Komponen ini mengutur kasesusian natikasi anggaran dibandinjakan dengan pagui anggaran yang tabah diselapah di injakunyan Persinjak Obesth. Nilai peryerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran berniak 40% apoblis serapan anggaran bersiak 40% apoblis serapan anggaran bersiak 40% apoblis serapan anggaran komika.  Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan sidak termasuk dana transfer dani pemerintah pusat.  b. Esismis adalah sisa dena yang diperakin setiakih palaksanan dani subbagianan yang tangaranannya tabih darapat Apabish persepanan dengaran realitasi anggaran dimensa selash lebih pagu dimeksud sedah bidak didalah selash bish pagu anggaran dengara nealitasi anggaran dimensa selash lebih pagu dimeksud sedah bidak didalah selash barabasin pangkan yang berakat dara transfer dan pencapanan dengara nealitasi anggaran dimensa selash lebih pagu dimeksud sedah bidak didalah anglikaci emoreh Anggaran hasil inputan POUAPD.  Pencapaian output adalah persentase capalah indikator kinasia subkegiatan (output), Realisasi pencapalan cutput dapat dilah didam anglikaci emoreh Anggaran hasil inputan POUAPD.  Fencapaian setuput adalah persentase capalah indikator kinasia subkegiatan (output), Realisasi pencapalah cutput dapat dilah didam anglikaci emoreh Anggaran hasil inputan POUAPD.  Realisasi (40%) - (Westisans X 10%), Polisasi pencapalan output X 50%)  Z. Serapan Anggaran ABOS, Samura untput 4 100%  Realisasi = (40%) - (pencapalain output x 50%)	N/A	MA	N/A	91%	91%	Persen
4	Meningkatnya kewirausahaan baru	1	Persentase penyelesalan rencana aksi Program Pembinasin dan Pengembangan Kewirausahsan Terpadu (nomor 20)	e-Money KSD	Realisasi penyelesalan dibandingkan laiget penyelesalan rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewkausahaan Tepadu (nornor 20)	100%	110%	100%	100%	100%	Persentase
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transperan dan akuntabal	1	Persentase penyelesalan rencana aksi Merah Laporan Kesangan Deerah dangan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (hornor 38)	e-Money KSD	Realisasi penyelesalan dibandingkan tanjet penyelesalan rencana aksi Merah Laporan Kauangan Ceerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (sooner 38)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencens aksi Mewujadkan Akuntakilitas Kinatia Indiansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	e-Money KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan tangat panyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntzbilitas Kiinerja Indansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (norror 39)	100%	190%	100%	100%	100%	Persentage
5	Terwujudnya kawasan perketaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berkut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rendana aksi Peringiatas Kualitas Kawasan Permukiman dan Mesyarakat (nonor 45)	e-Money KSD	Realises) penyelesalan dibandingkan langet penyelesalan rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyerakat (nomar 45)	NA	N/A	M/A	100%	100%	Persentase
7	Tenvujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transperan, akuntabel serta berbasis teknologi informesi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatas Kualtas Künerja Pemerintahan nomer (51)	e-Manev KSD	Reelisesi penyelessian dibardingkan target penyelesalan rancana aksi Peningkatan Kuelitas Kinerja Pemerinlahan Nomer(61)	NVA	100%	N/A	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)	e-Money KSO	Realisasi penyelesalan dibandingkan target penyelesalan rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomar 63)	100%	NIA	100%	N/A	100%	Persentase

14	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arakan Gubertur	1	Persentase capalan penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jurnfah Redissal TL Arahan Gubernur (sapin, e-office, arahan melalui media elektronik, den bentuk arahan Jainnya) dibegi Jurnlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
15	Meningkatnya penyeksaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyalesalan pengaduan masyarakat	CRM	Jurniah Realised TL Aduen Nesyarakat ditegi Jurniah TL Aduen Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
6	Meringkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepurasan Masyarakat	Jaksurvel	Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei	85	87	90	93	93	Niai
17	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuar hasil pemeriksaan eksterial (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi ternuan hasil pemeriksaan ekstemal (BPK)	e-Kinerja	Jurniah retomondasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang teleh diselesakkan oleh Petangket Deerah dan UKPD disewali koordinasinya dibagi jurniah seburuh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dibali 100% (Yerifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

Gubernur Daerah Khusus Ibukota

Inies Rasyid Baswedan, Ph.D

Jakarta, 2021 Walikota Jakarta Barat Provinsi IKI Jakurta,

NIP 197301211993031004

#### **REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021**

#### **TINGKAT ESELON II**

TING	REALISASI INDIKATOR KINERJA  TAHUN 2021  INGKAT ESELON II  Tujuan / Sasaran  Indikator tujuan  Indikator tujuan  Tujuan / Sasaran  Indikator tujuan  Tujuan / Sasaran  Indikator tujuan  Tujuan / Sasaran														
	Tujuan / Sasaran		Indikator tujuan	SATUAN		Kinerja	ı		Anggaran	1	Evaluasi Capaian	Unit Penanggung	strag		
	i ujuan / Sasaran		Indikator sasaran	AN	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Evaluasi Capalan	jawab di Kota Adm.			
masya Jakart sebaga yang w	udnya pelayanan prima kepada akat di wilayah Kota Administrasi i Barat untuk menciptakan Jakarta ii kota maju, lestari dan berbudaya arganya terlibat dalam mewujudkan daban dan kesejahteraan bagi	1	indeks kepuasan masyarakat	Indeks	88,00	90,62	102,98%	922.131.601.245	886.543.531.266		Indikator kinerja tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Unjuk kerja, kesungguhan, komitmen, inovasi, kreatifitas serta dan kapasitas dari seluruh pegawai termasuk koordinasi dan kerja sama yang baik dengan unit/instansi terkait perlu dipertahankan dan ditingkatkan		Jakarta Barat		
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Barat	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	Indeks	86,00	90,62	105,37%	566.769.454.633	524.218.622.140		Berkenaan dengan situasi pandemi Covid-19 dimana kegiatan Posyandu, Jumantik, PKK dan RPTRA/Taman Maju Bersama terdampak/terkena refocusing anggaran sehingga tidak dilaksanakan oleh para Camat/Lurah dan kebijakan tingkat provinsi sesuai hasil rapat pada Biro ORB, survei kepuasan masyarakat tahun 2020 dilaksanakan terhadap 2 (dua) jenis layanan yaitu PPSU dan Ketertiban Umum	1. Walikota 2. Wakil Walikota 3. Sekretaris			
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase	91,00	89,63	98,49%	355.362.146.612	342.324.909.126		Sebagian besar kegiatan terdampak refocusing anggaran/dimatikan, namun demikian tetap dilaksanakan tanpa anggaran dalam bentuk pengoordinasian, konsultasi, pemantauan dan evaluasi melalui media elektronik	Kota			
3	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua.	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,00	n/a	100,00%	0	0	100,00%	Tidak Tersedia Anggaran				

- Dukungan masyarakat, kinerja dari para Camat/Lurah serta koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit/instansi terkait dan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan survei
- Komitmen dan kinerja dari seluruh perangkat serta koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit/instansi terkait

Faktor Penghambat :
Keterlambatan penerbitan SPD, refocusing anggaran dan kondisi pandemi Covid-19

LKIP Kota Administrasi Jakarta Barat

### Tingkat Eselon III

program prioritas		IKATOR PROGAM (OUTCOME), STITUSI PEMERINTAHAN (IP)	SA		Kinerja			Anggaran			Unit Penanggung
pembangunan		Indikator Kinerja	SATUAN	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Evaluasi Capaian	jawab di Kota Adm. Jakarta Barat
Indikator Kinerja Setara Program											
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Pemerintahan	Indeks	86	90,45	105,17%	-	-	-	Nilai IKM Bidang Ketertiban Umum	Asisten Pemerintahan
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Perekonomian dan Pembangunan	Indeks	86	90,88	105,67%	-	-	-	Nilai IKM Bidang PPSU	Asisten Perekonomian dan Pembanngunan
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Kesejahteraan Rakyat	Indeks	86	90,67	105,37%	-	-	-	Berkenaan dengan situasi pandemi Covid-19 dimana kegiatan Posyandu, Jumantik, PKK dan RPTRA/Taman Maju Bersama terdampak / terkena refocusing anggaran sehingga tidak dilaksanakan oleh para Camat/Lurah dan kebijakan tingkat provinsi sesuai hasil rapat pada Biro ORB, survei kepuasan masyarakat tahun 2020 dilaksanakan hanya terhadap 2 (dua) jenis layanan yaitu PPSU dan Ketertiban Umum nilai bidang Kesejahteraan Rakyat selanjutnya disetarakan dengan nilai IKM tingkat kota	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							376.126.347.245	359.526.727.477	98,99%	Rata-rata pelaksnaan program pada 98,99 % pada Indeks kepuasan Layanan Kantor  Faktor Pendorong: Pelaksanaan pemberian layanan terbaik pada masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat  Faktor Penghambat: Refocusing anggaran dan kondisi pandemi Covid-19	1) Kabag Umum 2) Camat, Wakil Camat Sekretaris Kecamatan 3) Lurah
PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN							206.512.245.468	203.556.660.428	98,66%	Rata-rata pelaksnaan program pada 98,66 % pada Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan	1) Camat 2),Lurah

LKIP Kota Administrasi Jakarta Barat

program prioritas	INDIKATOR PROGAM (OUTCOME), INSTITUSI PEMERINTAHAN (IP)	S <sub>A</sub> :		Kinerja			Anggaran			Unit Penanggung
pembangunan	Indikator Kinerja	SATUAN	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Evaluasi Capaian	jawab di Kota Adm. Jakarta Barat
									Komitmen dan kinerja didukung koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit kerja terkait peningkatan kinerja Kelurahan dan Kecamatan	2
									Faktor Penghambat : Pembatasan social kemasyarakatan, target capaian penegakan hukum dan vaksinasi	
									Rata-rata pelaksnaan program pada 98,96 % pada Persentase Capaian Penyelenggaraan indikator Program	
PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI						10.248.645.654	6.644.757.464	98,96%	Faktor Pendorong: Komitmen dan kinerja mencapai realisasi kinerja 100 %, Kolaboorasi,dan penanganan Kinerja tugas dan fungsi	1) Para Kabag Setko Kota Adm.Jakarta Barat 2) Camat
									Faktor Penghambat : Refocusing anggaran, kondisi Pandemi Covid 19, tidak terselenggaranya kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia karena kegiatan ditiadakan.	3) Lurah
									Rata-rata pelaksnaan program pada 99,84 % pada Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Kelurahan dan Kecamatan	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						272.436.629.218	265.930.872.308	99,84%	Faktor Pendorong: Komitmen dan kinerja mencapai realisasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan didukung Reformasi Birokrasi	1) Camat 2),Lurah
									Faktor Penghambat: Refocusing anggaran, kondisi Pandemi Covid 19, penambahan tugas dan fungsi seperti target penanganan jenazah Covid 19 < 6 jam dan Capaian	
İ									Vaksinasi diatas 80 oersen	

LKIP Kota Administrasi Jakarta Barat

program prioritas	INDIKATOR PROGAM (OUTCOME), INSTITUSI PEMERINTAHAN (IP)	SA:		Kinerja			Anggaran			Unit Penanggung
program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja	SATUAN	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Evaluasi Capaian	jawab di Kota Adm. Jakarta Barat
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									program pada 98,95 % pada Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kelurahan dan Kelurahan dan Kelurahan dan Kecamatan Faktor Pendorong: Komitmen dan kinerja mencapai realisasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan pelaksanaan Budaya Organisasi Pemprov DKI Jakarta  Faktor Penghambat: Refocusing anggaran, kondisi Pandemi Covid 19, kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi pada pelaksanaan kebersihan dan ketertiban umum.	2),Lurah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						2.122.054.514	1.853.154.818	99,10%	Rata-rata pelaksnaan program pada 99,10 % pada Indeks Kepuasan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Kelurahan dan Kecamatan  Faktor Pendorong: Komitmen dan kinerja mencapai realisasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan memberikan layanan terbaik pada masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat dengan cepat menangani pengaduan pada seluruh kanal pengaduan Pemprov DKI Jakarta  Faktor Penghambat: Refocusing anggaran, kondisi Pandemi Covid 19, laporan pengaduan yang perlu di Tindak lanjuti pada Tahun berjalan kedepannya.	1) Camat 2) Lurah

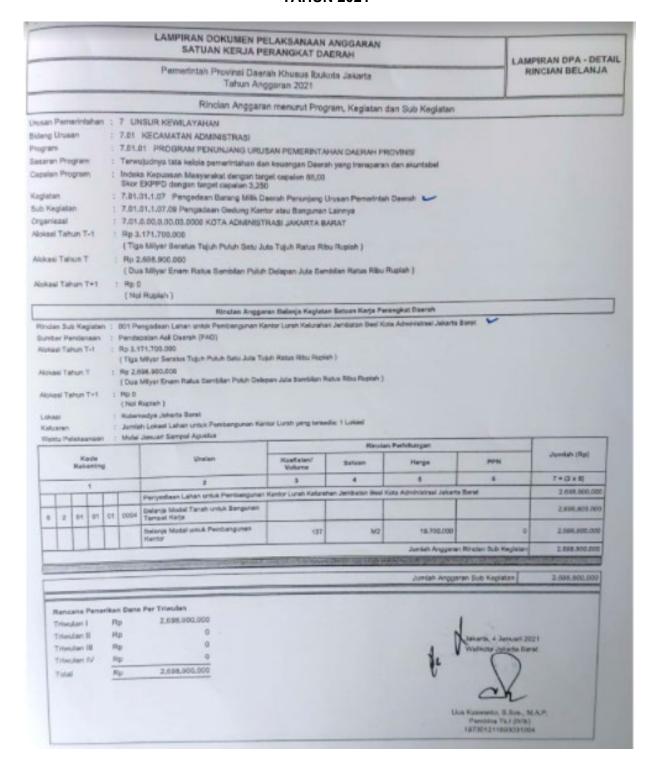
#### REALISASI ANGGARAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

No	PD/UKPD	Target (APBD Perubahan Tahun 2021	Realisasi Aggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2021 (%)
1	KECAMATAN CENGKARENG - JAKBAR	943.527.064	907.451.351	96,18%
2	KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN - JAKBAR	1.459.301.054	1.366.870.426	93,67%
3	KECAMATAN KALIDERES - JAKBAR	1.303.017.818	1.202.294.070	92,27%
4	KECAMATAN KEBON JERUK - JAKBAR	1.313.116.229	1.254.227.679	95,52%
5	KECAMATAN KEMBANGAN - JAKBAR	1.321.026.305	1.226.206.019	92,82%
6	KECAMATAN PALMERAH - JAKBAR	1.263.994.741	1.162.774.460	91,99%
7	KECAMATAN TAMAN SARI - JAKBAR	1.159.023.505	1.087.690.230	93,85%
8	KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR	1.218.003.719	1.117.076.976	91,71%
9	KELURAHAN ANGKE - JAKBAR	10.502.605.178	9.856.755.277	93,85%
10	KELURAHAN CENGKARENG BARAT - JAKBAR	15.359.587.471	14.920.489.037	97,14%
11	KELURAHAN CENGKARENG TIMUR - JAKBAR	16.451.456.582	15.946.952.866	96,93%
12	KELURAHAN DURI KEPA - JAKBAR	11.686.918.254	11.159.456.898	95,49%
13	KELURAHAN DURI KOSAMBI - JAKBAR	13.568.615.029	13.064.564.038	96,29%
14	KELURAHAN DURI SELATAN - JAKBAR	6.290.230.920	6.071.978.150	96,53%
15	KELURAHAN DURI UTARA - JAKBAR	6.959.795.867	6.687.429.156	96,09%
16	KELURAHAN GLODOK - JAKBAR	6.386.517.180	6.155.354.755	96,38%
17	KELURAHAN GROGOL - JAKBAR	9.069.631.153	8.728.513.815	96,24%
18	KELURAHAN JATI PULO - JAKBAR	10.227.876.822	9.673.725.209	94,58%
19	KELURAHAN JELAMBAR - JAKBAR	10.176.098.529	9.735.174.579	95,67%
20	KELURAHAN JELAMBAR BARU - JAKBAR	10.145.204.729	9.692.646.134	95,54%
21	KELURAHAN JEMBATAN BESI -	8.430.340.722	7.954.577.404	94,36%

No	PD/UKPD	Target (APBD Perubahan Tahun 2021	Realisasi Aggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2021 (%)
	JAKBAR			
	KELURAHAN JEMBATAN LIMA -	7.509.766.675	7.180.024.720	95,61%
22	JAKBAR			
23	KELURAHAN JOGLO - JAKBAR	10.728.897.595	10.273.589.234	95,76%
24	KELURAHAN KALI ANYAR - JAKBAR	7.225.623.810	6.871.059.045	95,09%
25	KELURAHAN KALIDERES - JAKBAR	14.786.377.454	14.291.612.742	96,65%
26	KELURAHAN KAMAL - JAKBAR	10.506.647.508	10.177.805.873	96,87%
27	KELURAHAN KAPUK - JAKBAR	15.224.771.200	14.926.608.736	98,04%
28	KELURAHAN KEAGUNGAN - JAKBAR	8.044.243.697	7.661.750.664	95,25%
29	KELURAHAN KEBON JERUK - JAKBAR	12.227.171.705	11.939.740.000	97,65%
	KELURAHAN KEDAUNG KALI	10.229.168.754	9.922.774.179	97,00%
30	ANGKE - JAKBAR			
31	KELURAHAN KEDOYA SELATAN - JAKBAR	9.052.855.556	8.668.261.324	95,75%
32	KELURAHAN KEDOYA UTARA - JAKBAR	11.877.483.642	11.377.939.379	95,79%
33	KELURAHAN KELAPA DUA - JAKBAR	6.746.800.371	6.454.302.890	95,66%
34	KELURAHAN KEMANGGISAN - JAKBAR	10.223.717.575	9.776.161.838	95,62%
35	KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN - JAKBAR	12.211.964.529	11.767.884.743	96,36%
36	KELURAHAN KEMBANGAN UTARA - JAKBAR	10.978.369.875	10.622.425.193	96,76%
37	KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN - JAKBAR	7.619.781.693	7.397.116.939	97,08%
38	KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA - JAKBAR	8.338.444.299	7.782.472.818	93,33%
39	KELURAHAN KRENDANG - JAKBAR	7.411.030.142	7.220.787.254	97,43%
40	KELURAHAN KRUKUT - JAKBAR	7.649.311.407	7.443.383.416	97,31%
	KELURAHAN MANGGA BESAR -	5.977.266.911	5.523.033.551	92,40%
41	JAKBAR			·
42	KELURAHAN MAPHAR - JAKBAR	8.073.608.853	7.693.000.220	95,29%
43	KELURAHAN MERUYA SELATAN - JAKBAR	10.864.240.673	10.125.225.095	93,20%
44	KELURAHAN MERUYA UTARA -	12.622.449.958	12.076.780.679	95,68%

No	PD/UKPD	Target (APBD Perubahan Tahun	Realisasi Aggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran
		2021	(Rp)	Tahun 2021 (%)
	JAKBAR			
	KELURAHAN PALMERAH -	13.275.100.926	12.722.119.003	95,83%
45	JAKBAR			
	KELURAHAN PEGADUNGAN -	14.679.171.658	14.331.174.665	97,63%
46	JAKBAR			
47	KELURAHAN PEKOJAN - JAKBAR	9.255.962.222	8.945.127.806	96,64%
	KELURAHAN PINANGSIA -	9.438.391.866	9.168.494.869	97,14%
48	JAKBAR SAMA BUAYA	44.055.034.370	42.624.020.207	06.020/
40	KELURAHAN RAWA BUAYA -	14.055.021.378	13.621.820.307	96,92%
49	JAKBAR KELURAHAN ROA MALAKA -	5.966.329.435	5.534.283.365	92,76%
50	JAKBAR	5.900.529.455	5.554.265.505	92,70%
- 50	KELURAHAN SEMANAN -	10.538.049.101	10.151.267.739	96,33%
51	JAKBAR	20.550.0 15.202	10:131:1207:733	30,3370
52	KELURAHAN SLIPI - JAKBAR	7.252.881.942	6.932.205.975	95,58%
	KELURAHAN SRENGSENG -	10.104.416.152	9.766.367.538	96,65%
53	JAKBAR			,
	KELURAHAN SUKABUMI	7.569.246.272	7.299.603.938	96,44%
54	SELATAN - JAKBAR			
	KELURAHAN SUKABUMI UTARA	8.454.433.970	8.208.064.976	97,09%
55	- JAKBAR			
	KELURAHAN TAMAN SARI -	7.352.319.108	7.164.807.852	97,45%
56	JAKBAR	6.456.240.624	5 050 046 544	05.460/
E 7	KELURAHAN TAMBORA - JAKBAR	6.156.218.624	5.858.016.514	95,16%
57	KELURAHAN TANAH SEREAL -	9.959.357.693	9.466.863.797	95,05%
58	JAKBAR	9.939.337.093	9.400.803.797	93,0376
59	KELURAHAN TANGKI - JAKBAR	6.918.670.463	6.550.793.892	94,68%
33	KELURAHAN TANJUNG DUREN	8.252.293.939	7.916.541.122	95,93%
60	SELATAN - JAKBAR	0.232.230.333	7.510.5 11.122	33,3370
	KELURAHAN TANJUNG DUREN	8.759.625.735	8.349.344.995	95,32%
61	UTARA - JAKBAR			
	KELURAHAN TEGAL ALUR -	13.980.505.693	13.365.954.315	95,60%
62	JAKBAR			
	KELURAHAN TOMANG -	12.816.137.488	12.502.042.517	97,55%
63	JAKBAR			
0.4	KELURAHAN WIJAYA KUSUMA -	10.619.438.215	10.217.777.894	96,22%
64	JAKBAR	255 262 446 642	242 224 000 426	06.339/
6E	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	355.362.146.612	342.324.909.126	96,33%
65		922.131.601.245	886.543.531.266	96,14%
	Jumlah	322.131.001.213	000.5 15.551.200	30,1170

## LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENGADAAN LAHAN KELURAHAN JEMBATAN BESI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2021



## LAMPIRAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENGADAAN REHAB BERAT KANTOR CAMAT TAMANSARI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2021

						LAMPIRAN DOKUMEN PELA SATUAN KERJA PERJ	MISANAAN ANI ANGKAT DAER	IGARAN UH		LAMPIRA	N DPA - DETA
						Pernetintah Provinsi Daerah Tahun Angga	Khasus (bakota ran 2021	Jakarta		RINCH	IN BELANJA
						Rincian Anggeres s	THE REAL PROPERTY.	Kecistan dan 1	Lib Kanlatan		
Grande P	wite	tratal	4	. 7	UNK	SUR KEWILAYAHAN		The second second			
guary V	7,68					RECAMATAN ADMINISTRASI					
Program Savaran		_				PROGRAM PENUNJANG LIRLIGA udinya tata kelula pemerhahan dan k					
Capalier				1.4	ridelts	Kepussen Masyarakat dengan tarpat		od navebean on	and the same		
Ogstar				. 5	Bar k	KPPD dengan target depaten 3,250 5,1,09 Permilihansan Sarang MSK Di		ann Namadalaini	Daniel L		
Sub Key						1.1.2009 Pervelbersan/Rehabilitari C					
Deganile						00.0.00.00.000 NOTA ADMINISTRA	USI JAKARITA BARU	σ			
Alahani	Tahs	n To	١.		Mg- 76 Linu	.012.967,638 I Belas Miljor Dua Relas Juta Sertida	A Rabus Enam Polici	Tigue Hibs Lime	Ratus Tiga Pulch Share	Rupleh)	
Asked	Tah	mΤ									kupleh ).
Maria		-			(Line	i. 190,233,229 a Balan Milyar Benstus Semblian Palch 878,898,868	Sombler July Dua	Kutus Tiga Plain	The same training or		
Alchae	195	un ()			(Del Rupi	apan Milyar Dalapan Ratus Tujuk Pullal	h Delapor July Ene	- Ratus Sembler	Pulsin Delepen Pilijai Del	open Retus Enem P	Aut Senoter
							Balanja Kaglatan I	etcen Kerja Parang	kat Dearsh		
				: 1	on Pe	renosmaen Rehab Swist Kontor Cernel Ke					
Surviv Alches						palan Aut Chemin (FAC) FT9,62%					
				- 1	Sent	day Public Secretor, July Sevelier Ross					
Note	ed Tor	nun T		1	Due I	2,451,148 Natus Enem Public Juta Empai Retire Tiga	Polich Salv Pilos Stern	Car Empel Publish She	riplan (kupleh )		
Hote	el Te	Na T	41		Na D						
Love						suport ) eutpa Johann Berel					
Nake	-				Sanda	à Dokuman Perencansen Rebeb Beret Re	mar Carriet 1 column				
Wylou Pulskomen   Milol Jerusi Saltgel Juli						November of the last of the la	STATE OF THE PARTY	Ringlan F	whiteger		Jumps (Ref.
		Roks	-			Wales	Kostaleni Volume	Seisen	Harge	PPK	7+4+0
					77.1	Jose Konsultan Panansanaan Father Ben-	a vacor Const Tems	read Kota Apronism		-	250.400
4		п	68	OB.	0088	Sentrije Java Konsultansi Perencansan Ambatan-basi Gesah Assteksynd					289,450.)
-	-					Ged Carn Operator (SMS) (Inno Tahuri)	1 82	Chang- Bulger	7,800,800	1,820,000	19,720
-						Cutal Can Penggerdase Dukumen Panancalisian	4	-	88.870	23,548	286
	-				-	Cutes DBD		94	3.148.600	943.360	19,380.4
	+	-	-	-	-	Catal Leasen Foncepel Personnel	1	Dell	150,300	15.500	170.0
-	+	-	-	-		Computer Coelsion (Typins)	.,	Orang Bulan	8.200.000	1,040,000	11,440,
-	+	+	T	-		Estimator MTE DIS 5 Tenun		Orang Bulan	6,500,000	636.000	9.106.0
	+	+	-	1		Calmator Struktur OS/S Tahun	43	Chang Bullets	6,500,000	N94.900	87963
-	+	+	1	-		Jase Perituater Ligoron AMI: Nat. Fits, Cor. Gentler	4	Cryng Bulos	MOD. 2000	245,000	296
-		t	T	T		Lappron Pendahukan Penansahkan	2	States	201,310	20,481	221.0
	1	-	-		Г	Surveyor 81 (b-3 Tahun)	**	Orang States	7,800,000	LAMORE	75.406.0
		+									
		-				Tanage ANI Medys Psychiatra 61 Pengalaman 2 Tahun Unio Layeran Jasa Kinshana Kemahukai	2 82	Owng Shiles	32,500,000	1,000,000	94,000.0
						Tanage AM Medys Pundsthan 51 Pengalaman 2 Salsan Union Cayerran Jisas Pundstana	2 62 2 63	Owng Salan Davig Salan	22,500,000 19,600,000 Austal-Angueren No	7.400.000	91.000.0 91.400.0

#### PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DIRAIH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2021

No	Unit Kerja Terkait	Pre	stasi	Tingkat	Unit/ Organisasi Yang Mengeluarkan Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi
1	2		3	4	5	6	7
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat	a.	Juara Umum Lomba MTQ	Provinsi DKI Jakarta	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi DKI Jakarta	Diberikan kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat	
		b.	Kota Layak Anak Peringkat Madya Tahun 2021	Nasional	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Diberikan kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat pada 29 Juli 2021	Potentials Res Automotive Burn Burn Burn Burn Burn Burn Burn Burn
		C.	Serifikat Eradikasi Frambusia	Nasional	Kementerian Kesehatan	Serifikat diberikan kepada Kota Administrasi Jakarta Barat	SERTIFIKAT ERADIKASI FRAMBUSIA  FROM THE PROVINCE OF THE PRO
		d.	Juara I Kategori Tunggal Putra Kejuaraan Nasional Virtual Pencak Silat Festival dan Kategori Tunggal Kartini Cup 2021	Nasional	Kemenpora R.I.	Piagam Penghargaan diberikan kepada Sdr Kevin SMKN 9 Jakarta	PAGE IN PERIORS CAN  WENT NOTICE TO STATE THE THE THE THE THE THE THE THE THE T
		e.	Juara I Kategori Pelajar dalam rangka Kontes Foto Kreatif bertema Floorball se-Indonesia yang diselenggarakan oleh UKM Floorball UNESA pada tanggal 8-28 April 2021	Nasional	UKM Floorball UNESA	Sertifikat diberikan Fitra Noviar Ramadhan SMKS TELKOM	FITE A NOVIA REAMADHAN  WHAT  OR THE

	f.	Juara I Freestyle Floorball Competition Kategori Pelajar dalam rangka Perlombaan Photo Freestyle Competition dengan tema "Improve Your Skill And Burn Up Your Passion yang diselenggarkan pada tanggal 19 Juli - 17 Agustus 2021	Provinsi DKI Jakarta	AFI DKI Jakarta	Sertifikat diberikan kepada Aditya Rizki Pratama SMKS TELKOM	SERTIFICAT  SINCE  SERTIFICAT  Contracted  MODES  MEDITAL RIZKY PREIAMA  MODES  MEDITAL RIZKY PREIAMA  MODES  MEDITAL RIZKY PREIAMA  MODES  MEDITAL RIZKY PREIAMA  MODES
	g.	Peraih Medali Emas Karya Tulis Ilmiah jenjang SMA tingkat Nasional dalam kegiatan Super Brain Challenge 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 17- 28 Maret 2021	Nasional	Karya Ilmiah Remaja (KIR) SMA Negeri 19 Surabaya	Piagam diberikan kepada Didi Halim	PIAGAM Discrimina Proposition of the Proposition of
	h.	Juara 1 Lomba Virtual Freestyle Floorball	Nasional	Pengprov AFI Banten	Piagam Penghargaan diberikan kepada Aditya Rizki Pratama SMKS TELKOM	PLASCAS PERSONAL MANAGEMENT AND
	i.	Juara 2 Lomba Virtual Freestyle Floorball	Nasional	Pengprov AFI Banten	Piagam Penghargaan diberikan kepada Rizki Sendio Fani SMKS TELKOM	PLACEMAN PERSONAL MANAGEMENT AND MAN
	j.	Juara 3 Lomba Virtual Freestyle Floorball	Nasional	Pengprov AFI Banten	Piagam Penghargaan diberikan kepada Fitra Noviar Ramadhan SMKS TELKOM	PIAGAM PENGILARGAAN  IMPERIAL MENTAN PENGILARGAAN  IMPERIAL MENTAN PENGILARGA

	k.	Techno Cup 2021 Competition 2021 Internasional Even "Millenials 2.0 for Industrial 4.0" category Poster Design (Junior)	Internasional	Student Association President Of Computer And Informatics Engineering	Sertifikat diberikan kepada Imelda Damayanti SMKS TELKOM	CERTIFICATE  MILIDA DAMAYAHT  II. WARRES  PORTIFICATE  A STATE OF THE PORTIFICATE  A S
	L.	Juara 1 Fotografi Perlombaan Sekoria Games 2021	Provinsi DKI Jakarta	SMA Negeri 78 Jakarta	Piagam Penghargaan diberikan kepada Charies Prayoga S.	SMA Negeri 75 Jahorta Manisha
	m.	Masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021, SI- IMUT (Skrining Integrasi Masyarakat Tamansari)	Nasional	Kemenpan RB	Sertifikat diberikan kepada Fadhel J. Muhammad, S.Kom Puskesmas Kecamatan Tamansari	SERTIFIKAT  di Controlling  de
	n.	Masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021, SI- IMUT (Skrining Integrasi Masyarakat Tamansari)	Nasional	Kemenpan RB	Sertifikat diberikan kepada dr. Widyastutu, MKM Puskesmas Kecamatan Tamansari	SERTIFICAT  See the see that th
	0.	Masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021, SI- IMUT (Skrining Integrasi Masyarakat Tamansari)	Nasional	Kemenpan RB	Sertifikat diberikan kepada dr. Valentina Fransisca Wibowo Puskesmas Kecamatan Tamansari	SERTIFICAT  A Challen Shalla China  A China China  A China China  A China China  A
	p.	Masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021, SI- IMUT (Skrining Integrasi Masyarakat Tamansari)	Nasional	Kemenpan RB	Sertifikat diberikan kepada dr. Arum Puspitasari Puskesmas Kecamatan Tamansari	SERTIFICAT  SERTIFICAT  SOUTH TO THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE

		q.	Masuk dalam Top	Nasional	Kemenpan RB	Sertifikat	
		1	99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021, SI- IMUT (Skrining Integrasi Masyarakat Tamansari)			diberikan kepada dr. Syukur Pelianus Telaumbanua Puskesmas Kecamatan Tamansari	POTTO SERTIFIKAT  *****  ******  ******  *****  *****  ****
		r.	Masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021, SI- IMUT (Skrining Integrasi Masyarakat Tamansari)	Nasional	Kemenpan RB	Sertifikat diberikan kepada drg. Kristy Wathini Puskesmas Kecamatan Tamansari	SERTIFIKAT  SERTIFIKAT  For the Part of the Market  Browner  Part of the Market  Part of the Market  And a state And a name on overer constant  SA-HET (Salving Augustus (Linux Salv)  part for part of the Work of the Market  On the Market of the Market of the Market  On the Market of the Market o
		s.	Masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021, SI- IMUT (Skrining Integrasi Masyarakat Tamansari)	Nasional	Kemenpan RB	Sertifikat diberikan kepada dr. Weningtyas Purnomorini, MaRS Puskesmas Kecamatan Tamansari	SERTIFIKAT  A Georgia Phonosis ALCA  Investigation of Control Control  Investigation of Control  SHITT Shirtly brigged (Ingentity Time Ser)  ord Acquel to rest Acquel to the Art of Coll  On the Control Control  SHITT Shirtly brigged (Ingentity Time Ser)  ord Acquel to rest Acquel to the Art of Coll  On the Control  A
		t.	Juara III Putri Musabaqoh Tilawatil Qur'an Jenjang SMA/SMK/Paket C Kegiatan Ramadhan Ceria 1442 H	Provinsi DKI Jakarta	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Penghargaan diberikan kepada Fadliyah SMA Negeri 94 Jakarta	PRINCE OF THE STATE OF THE STAT
		u.	Mendapat medali perunggu kategori voli putri di PON Papua	Nasional		Medali diberikan kepada Syafira Reyna Siswi SMA 33 Cengkareng	O LAH
2	Pagion University	v.	Kota Jakarta Barat sebagai Kota Penerima Anugrah Parahita Ekapraya Tahun 2020 Kategori Pratama	Nasional Nasional	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Diberikan kepada Kota Jakarta Barat pada 6 September 2021	And the second s
2	Bagian Umum dan Protokol	a.	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 Sebagai Badan Publik Terbaik	Provinsi DKI Jakarta	Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	Diberikan kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat	ACTUMENTS AND AC

			dari Kategori Pemerintah Kota/Kab Administrasi				AAVINFORMA IN 200
3	Bagian Perekonomian	a.	Jakarta Barat meraih juara 3 dalam Penilaian Lomba RSPA (Road Safety Partnership Action) Tahun 2021	Provinsi DKI Jakarta	Polda Metro DKI Jaya	Sinergitas antara Satlantas Polres Metro Jakarta Barat dengan Stake Holders di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat	Pingam Penghargaan  Bingam Penghargaan  Bingam Pingam Pingam  Bingam  Bing
4	Kecamatan Kebon Jeruk	a.	Pengumpulan Bulan Dana PMI Tertinggi	Kota Adm. Jakarta Barat	Gubernur Provinsi DKI Jakarta	Dberikan kepada Kepada Kecamatan Kebon Jeruk pada tanggal 22 Desember 2022	The second secon
5	Kecamatan Kembangan	a.	Juara I Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	Diberikan kepada Kepada Kecamatan Kebon Jeruk pada tanggal 16 Desember 2022	PENGANUSERALAN PENGAN
6	Kecamatan Kalideres	а.	Juara I Tingkat Provinsi DKI JakartaLomba Pantun Kesehatan	Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	Juara I Tingkat Provinsi DKI Jakarta	
		b.	Juara I Tingkat Nasional Lomba Vlog Pokja IV	Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	Juara I Tingkat Nasional	
7	Kelurahan Grogol	a.	Juara II Perilaku Hidup Bersih Sehat Ketegori Kota	Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	Piagam Penghargaan Juara II Perilaku Hidup Bersih Sehat Ketegori Kota diberikan pada tanggal 30 Juni 2021	

8	Kelurahan Angke	a.	Terbaik I Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Tingkat Nasional	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	
9	Kelurahan Tegal Alur	a.	Juara Harapan 2 Lomba Pengelolaan Sampah terbaik (RW 04 Kelurahan Tegal Alur)	Provinsi DKI Jakarta	Dinas Lingkungan Hidup	
		b.	Juara Harapan 2 Lomba Proklim terbaik (RW 04 Kelurahan Tegal Alur)	Provinsi DKI Jakarta	Dinas Lingkungan Hidup	
		C.	Juara 1 Lomba Tik Tok Kategori Umum dalam rangkaian kampanye 16 hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Provinsi DKI Jakarta	Dinas PPAPP	
10	Kelurahan Tegal Alur	a.	Juara 1 Lomba Pantun tentang Kesehatan/Covid- 19	Provinsi DKI Jakarta	TP PKK Provinsi DKI Jakarta	
		b.	Juara 1 lomba Vlog Vaksinasi Pokja IV	Provinsi DKI Jakarta	TP PKK Provinsi DKI Jakarta	
		C.	Juara 2 Lomba Video hari Ibu	Provinsi DKI Jakarta	TP PKK Provinsi DKI Jakarta	
		d.	Juara 2 Lomba Video TikTok dengan Tema Kampanye 100 Hari anti Kekerasan Anak dan perempuan	Provinsi DKI Jakarta	Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta	







